

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Geografis dan Demografis Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten dari empat kabupaten yang terletak di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur selain Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sampang terletak pada 113^{008'} hingga 113^{039'} Bujur Timur dan 06^{005'} hingga 07^{013'} Lintang Selatan. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Sampang, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Wilayah Kabupaten secara umum berupa daratan dan terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan yaitu Pulau Mandangin / Pulau Kambing.⁶⁸

Kabupaten Sampang memiliki luas 1233,33 km² yang terbagi dalam 14 kecamatan dan 180 desa dan 6 kelurahan. Sebelum otonomi daerah Kabupaten Sampang terbagi dalam 12 Kecamatan. Namun sejak tahun 2003 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2003, tanggal 23 Juni 2003 tentang pembentukan Kecamatan Pangarengan dan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang. Karena terletak di sekitar garis khatulistiwa, seperti wilayah lainnya di Pulau Madura Kabupaten Sampang memiliki perubahan musim sebanyak dua kali setiap tahunnya, musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai Maret merupakan

⁶⁸ "Gambaran Umum Kabupaten Sampang" . dalam <https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/> diakses pada 10 Oktober 2018.

musim penghujan sedangkan bulan April sampai September adalah musim kemarau.⁶⁹



Sumber : <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/03/07/administrasi-kabupaten-sampang/>

Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Sampang

Sama halnya dengan kabupaten lain di pulau Madura, kondisi geografis Kabupaten Sampang memiliki bentang topografi yang relatif datar di bagian selatan dan semakin ke utara tidak mengalami perbedaan elevasi ketinggian yang begitu mencolok. Struktur tanah di Sampang sama halnya dengan struktur tanah di Pulau Madura berupa hampir 70 %

⁶⁹ Program Studi Damai dan resolusi Konflik, 2014, "Peran Budaya dalam Mewujudkan Harmonisasi dan Damai pada Masyarakat Kabupaten Sampang, Madura". "Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Cohort II, 2014. Hlm. 23

tanah mediterania yang berwarna kuning dan 15 % berupa tanah alluvial sehingga kurang produktif. Ekosistem di Pulau Madura adalah ekosistem ladang yang cenderung kering dan sedikit air. Oleh karena itu sektor pertanian didominasi oleh pertanian dengan sistem ladang. Sektor pertanian ini kurang begitu produktif dan berkembang pesat. Ini disebabkan karena proliferasi sektor ekonomi cenderung lambat karena masih banyak menggunakan sistem produksi yang sederhana sehingga tidak menstimulasi pertumbuhan sektor lainnya yang terkait.⁷⁰ Karena kondisi tanah yang kurang subur dan tidak baik untuk pertanian, banyak warga Madura yang merantau keluar daerahnya, sehingga etnis Madura merupakan etnis nomor empat terbanyak di Indonesia. Dengan kondisi geologis yang kering dan kondisi geografis yang dekat dengan laut, masyarakat Madura sering diasosiasikan bahwa masyarakat Madura memiliki watak yang keras dan memiliki daya tahan (*survive*) yang tinggi.

Dari faktor demografi, jumlah penduduk Kabupaten Sampang pada tahun 2015 sebanyak 919.825 yang terdiri dari 457.850 jiwa penduduk laki-laki dan 461.965 jiwa penduduk perempuan. Dengan Kecamatan Sampang dan Kecamatan Kedundung sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Kecamatan Sampang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Mayoritas masyarakat Kabupaten Sampang merupakan pemeluk Agama Islam. Dalam sensus penduduk BPS tahun 2010 dari 877.772 jiwa, 877.459 jiwa atau 99,96 % merupakan pemeluk agama Islam,⁷¹ 261 jiwa merupakan pemeluk Kristen Protestan, 49 jiwa merupakan pemeluk Katolik, 2 jiwa merupakan pemeluk Hindu dan 1 jiwa merupakan pemeluk agama Budha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sampang merupakan masyarakat yang

⁷⁰ Iqbal Nurul Azhar, "Memposisikan Kembali Peran Kyai dan Pesantren Dalam Membangun Pariwisata di Madura" Dalam Buku "Madura 2020:Membumikan Madura Menuju Globalisasi" (Malang, Inteligencia: 2018)

⁷¹ Dari 877.459 jiwa yang beragama Islam ada setidaknya 253 warga pemeluk Syi'ah yang berada di dua desa yaitu Desa Karanggayam dan Desa Blu'uran Kecamatan Omben. Lihat juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dokumen Rangkaian Peristiwa Omben-Sampang,

homogen. Setidaknya homogenitas ini terdiri atas dua unsur, yaitu homogen secara lembaga keagamaan yaitu mayoritas penduduk Sampang beragama Islam dan merupakan warga Nahdliyyin (NU). Sedangkan homogenitas yang kedua merupakan homogen secara etnik dan kebudayaan yaitu etnik dan budaya Madura.⁷²

Masyarakat Madura yang mayoritas muslim serta kental akan budaya keagamaan sehingga masyarakat Madura lebih memilih menyekolahkan anaknya pada institusi pendidikan keagamaan atau pondok pesantren dan madrasah diniyah amaliyah. Setidaknya dalam data BPS pada tahun 2016 di Kabupaten Sampang terdapat 351 pondok pesantren dengan total jumlah santri sebanyak 54.168 orang. Angka partisipasi sekolah yang paling tinggi di Kabupaten Sampang terjadi di pendidikan dasar dan semakin menurun dengan tingginya jenjang pendidikan. Dan angka putus sekolah menunjukkan tren sebaliknya, rendah pada jenjang pendidikan dasar kemudian meninggi seiring tingginya jenjang pendidikan.⁷³

Dari sisi sumber daya manusia dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang pada tahun 2017 adalah 59,90 merupakan terendah dari empat Kabupaten di Pulau Madura dan merupakan peringkat paling akhir dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator terpenting dalam mengukur keberhasilan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM diukur melalui empat komponen yang meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Semakin rendah nilai IPM di suatu wilayah akan diasosiasikan semakin berpotensi

⁷² Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Sampang Dalam Angka 2017". *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang*, 2017. Hlm. 83

⁷³ *Ibid*, hlm. 127

menjadi kelompok rentan yang mudah terprovokasi dan dimobilisasi untuk terlibat dalam konflik.⁷⁴

Tabel 4.1 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Pulau Madura

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Madura dengan Rata-rata Provinsi Jawa Timur					
<i>Human Development Index Comparison Across Regions in Madura With Average East Java Regions</i>					
2010-2017					
Tahun <i>Year</i>	Indikator/ <i>Indicators</i>				
	Kabupaten Sumenep <i>Sumenep</i> <i>Regency</i>	Kabupaten Pamekasan <i>Pamekasan</i> <i>Regency</i>	Kabupaten Sampang <i>Sampang</i> <i>Regency</i>	Kabupaten Bangkalan <i>Bangkalan</i> <i>Regency</i>	Provinsi Jawa Timur <i>East Java</i> <i>Region</i>
1	2	3	4	5	6
2010	57,27	59,37	54,49	57,23	65,36
2011	58,70	60,42	55,17	58,63	66,06
2012	60,08	61,21	55,78	59,65	66,74
2013	60,84	62,27	56,45	60,19	67,55
2014	61,43	62,66	56,98	60,71	68,14
2015	62,38	63,10	58,18	61,49	68,95
2016	63,42	63,98	59,09	62,06	69,74
2017	64,28	64,93	59,90	62,30	70,74
Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur					
<i>Source Statistics Of East Java Province</i>					

Dalam rilis dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tahun 2016 Kabupaten Sampang termasuk dalam salah satu dari 122 kabupaten tertinggal di Di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, suatu daerah dikatakan tertinggal berdasarkan beberapa kriteria yaitu : perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana;

⁷⁴ Konsep Indeks pembangunan Manusia". Dalam <https://jatim.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1> diakses pada 28 Oktober 2018.

kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.⁷⁵ Dalam rilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tahun 2016 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang sebanyak 227.800 jiwa dengan presentase 21,41 % jumlah penduduk dengan pendapatan perkapita per bulan Rp 296.268. Dan 18 desa dari 180 desa Di Sampang dikategorikan sebagai desa tertinggal.⁷⁶

Dalam konflik antara pengikut aliran Syi'ah dan Sunni di Kabupaten Sampang terjadi di dua desa yang berdekatan yaitu Desa Karanggayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang.

4.1.2 Kondisi Sosiokultur Masyarakat Madura

Untuk memahami konflik yang terjadi antara kelompok Sunni dan Syi'ah yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura sebaiknya kita juga melihat bagaimanana kondisi sosiokultur masyarakat Madura. Sebab dimensi budaya dalam waktu yang sama menjadi bagian dari masalah dan bagian dari solusi. Maka dalam sub-bab ini penulis akan menyajikan identifikasi sosiokultur masyarakat Madura dalam kaitannya konflik bernuansa agama antara penganut Sunni dan Syi'ah di Madura.

Stigma sosial yang berkembang mengenai masyarakat Madura yang identik dengan kekerasan dan keterbelakangan telah muncul sejak lama bahkan stigma tersebut telah berkembang sejak zaman kolonial. De Jonge menggambarkan masyarakat dan kebudayaan Madura dicitrakan sebagai masyarakat yang *sangar*, tidak sopan, blak-blakan, kaku dan *extrovert* dan mudah menggunakan senjata untuk memecahkan masalah. Citra ini sebenarnya cukup beralasan, mengingat orang Madura harus berjuang keras untuk menjalani kehidupan akibat kondisi alam yang tidak

⁷⁵ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

⁷⁶ Diolah dari Profil Daerah Tertinggal, http://datin.kemendesa.go.id/simpورا/rpt_kemiskinan_122smry.php?start=4 diakses pada 6 Desember 2018.

bersahabat, kurang subur dan kurang air. Sehingga untuk mempertahankan sejengkal tanahnya orang Madura rela untuk melakukan apa saja termasuk mempertaruhkan nyawa mereka.⁷⁷ Beberapa stereotipe negatif yang melekat tersebut kemudian dijadikan standar pemahaman di masyarakat luas tentang konstruksi budaya Madura, bahkan seringkali dikomparasikan dengan etnis lain di Indonesia, khususnya etnis Jawa sebagai tetangga dekatnya yang dianggap lebih halus. Padahal De Jonge juga menulis bahwa orang Madura juga dikenal sebagai pribadi yang tekun, berani, suak berpetualang, setia, loyal, hemat, ceria, antusias dan humoris.⁷⁸

Dalam kaitannya dengan hubungan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura diatur oleh tiga pilar kepatuhan yang hierarkis yang terdiri dari *bhubba' bhabhu'* (Ayah ibu-orangtua), *ghuru* (guru-ulama/kiai), dan *rato'* (pemimpin-dalam birokrasi). Ketiga sentral figur tersebut menjadi standar kepatuhan yang memiliki kuasa dalam menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat di Madura. Dari ketiga pilar kepatuhan tersebut posisi kiai menduduki posisi sentral dan bukan hanya menangani aspek-aspek keagamaan, namun juga dalam segala aspek kehidupan lain. Implementasi nilai kepatuhan ini tidak hanya dilakukan melalui keharusan moral yang dituntut dalam masyarakat, namun juga melalui indoktrinasi yang ditanamkan oleh ustadz dan pemuka agama di lingkungan madrasah diniyah, dan surau-surau bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, maka menentang *dhawuh* kiai adalah sebuah dosa. Indoktrinasi ini juga berpengaruh pada perilaku masyarakat, dalam kasus konflik di Sampang bila kiai mengatakan ajaran Syiah sesat maka sampai kapanpun ajaran Syi'ah tidak akan diterima di Sampang.

⁷⁷ Iqbal Nurul Azhar, "Memposisikan Kembali Peran Kyia dan Pesantren Dalam Membangun Pariwisata di Madura" Dalam Buku "Madura 2020:Membumikan Madura Menuju Globalisasi" (Malang, Inteligencia: 2018) hlm. 146

⁷⁸ Eko Kusumo, "Menakar Kejantanan Blater: Sosok Penjaga Stabilitas keamanan dan Pembangunan Wilayah di Madura" Dalam Buku "Madura 2020:Membumikan Madura Menuju Globalisasi" (Malang, Inteligencia: 2018) hlm. 67

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan bergulirnya reformasi, serta pergeseran pola pikir masyarakat, peran kyai di masa kini mulai memudar meskipun diberbagai tempat kiai masih menjadi tokoh sentral yang menjadi rujukan meskipun tidak se-sakral dahulu.⁷⁹

Sebagaimana diketahui, bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang identik dengan Islam. Citra Madura sebagai “masyarakat santri” telah melekat kuat, hampir seluruh rumah di Madura memiliki *langgar* atau mushalla kecil tempat keluarga melaksanakan sholat. Di Madura juga terlihat jelas tampak deretan pesantren, masjid, musholla dari ujung barat (Bangkalan) hingga ujung timur (Sumenep). Islam dan masyarakat Madura tidak dapat dipisahkan, keanggotaan seseorang dalam etnik Madura ditentukan oleh melekatnya identitas Islam pada pribadi orang tersebut. Artinya, jika orang Madura tersebut tidak lagi memeluk agama Islam, maka ia tidak dapat lagi disebut sebagai bagian orang Madura.⁸⁰

Selanjutnya, masyarakat Madura adalah masyarakat yang amat menjunjung tinggi harga diri (*self esteem*), baik harga diri pribadi, keluarga dan agama. Budaya *carok* adalah implementasi masyarakat Madura dalam menjaga harga diri mereka. Ada pepatah di Madura “*Lebih baek poteh tulang, daripada poteh mata*” yang artinya kurang lebih lebih baik mati daripada harus mati menanggung malu (karena harga diri diinjak injak). Masyarakat Madura akan sangat kehilangan harga diri bila telah menyangkut tiga perkara, yaitu : *tanah, wanita, dan agama*. Bila ketiga perkara tersebut dilecehkan dan direndahkan, maka masyarakat Madura akan rela mempertaruhkan nyawa mereka demi mengembalikan harga diri mereka.⁸¹

⁷⁹ Ibid, hlm. 68

⁸⁰ Afif Amarullah, “Islam Di Madura”. *Jurnal Islamuna, STAIN Pamekasan Madura*. Volume 2 Nomor 1, Juni 2015. Hlm 64

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Rudi Setyadi, S.E, M.M , Kakesbangpol Kabupaten Sampang, di Rumah Dinas Bupati Sampang pada 17 September 2018.

Tradisi carok sebagai implementasi menjaga harga diri memiliki dua aspek yang bertolak belakang, ada aspek positif maupun negatif dari tradisi carok yang telah menjadi tradisi turun temurun di Madura. Aspek positif dari carok antara lain memberikan perlindungan kepada perempuan, keluarga dan agama namun sisi negatifnya adalah timbulnya dendam yang berkepanjangan dan seakan akan tanpa pengampunan. Timbulnya dendam yang seakan tak berkesudahan ini bukannya tanpa alasan, sebab para korban carok biasanya dimakamkan di halaman depan rumah yang bertujuan agar para anggota keluarga dan keturunannya kelak ingat akan hal itu. Selain itu pakaian korban carok juga disimpan agar anak cucunya mengingat dan akan memberikan balas dendam. Dampak negatif lain dari budaya carok ini juga melunturkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh para kiai dalam hal menjaga silaturahmi dan kekeluargaan. Dampak negatif budaya carok juga menghambat proses resolusi konflik antara korban dan pelaku.⁸²

Dalam kaitannya terhadap konflik antara penganut Sunni dan Penganut Syi'ah yang terjadi di Kabupaten Sampang, tidak terlepas dari dua faktor sosiokultur masyarakat Madura, yaitu kepatuhan terhadap sentral figur ulama dan budaya carok. Dalam perkembangannya dakwah yang dilakukan oleh penganut Syi'ah di Sampang dinilai terlalu vulgar dan menyinggung figur kiai sebagai tokoh sentral, sehingga menyulut amarah para santri dan pengikut dari kiai. Selain itu ajaran Syi'ah sangat bertentangan dengan apa yang telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Madura yaitu Islam *Ahlu-Sunnah wal jamaah* yang mayoritas *Nahdliyyin* (NU). Sehingga Syi'ah dianggap sebagai penodaan terhadap agama Islam dan merendahkan wibawa ulama sebagai sentral figur masyarakat Madura. Masyarakat Madura sebenarnya merupakan masyarakat yang toleran dan terbuka terhadap perbedaan, di Sampang

⁸² Program Studi Damai dan resolusi Konflik, 2014, "Peran Budaya dalam Mewujudkan Harmonisasi dan Damai pada Masyarakat Kabupaten Sampang, Madura". "Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Cohort II, 2014. Hlm. 38-39

sendiri juga ada organisasi massa Islam lain seperti Muhammadiyah yang beberapa lembaga pendidikannya banyak ditemui di Sampang, dan ada pula LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Masyarakat Madura khususnya masyarakat Sampang menerima keberadaan mereka (Muhammadiyah dan ormas keagamaan lain) selama dakwah mereka tidak keluar dari *ahlussunah wal jamaah* dan tidak mengganggu tradisi-tradisi yang berkembang di kalangan *nahdliyyin*. Namun untuk Syi'ah masyarakat melakukan penolakan karena telah merendahkan wibawa kiai dan menyimpang dari *ahlussunnah wal jamaah*.⁸³

Dari sisi jamaah Syi'ah di Desa Karanggayam sendiri faktor kepatuhan kepada Kiai menjadi suatu alasan mengapa Syi'ah mudah berkembang. Tajul Muluk merupakan putra dari Kiai Makmun, Kiai terpandang didesanya semasa hidupnya. Pasca wafatnya kiai Makmun maka Tajul Muluk lah yang meneruskan dakwah ayahnya dengan metode yang berbeda dari ayahnya (Kiai Makmun) sehingga banyak masyarakat awam di Desa Karanggayam dan Desa Blu'uran yang ikut mengaji kepada Tajul Muluk. Syi'ah di Sampang tidak akan cepat berkembang jika Tajul Muluk bukan keturunan kiai misalnya. Dan bagi Tajul penolakan terhadap ajaran Syi'ah juga dianggap sebagai hal yang merendahkan ajaran Syi'ah yang telah dibawa oleh ayahnya, dan baginya membela keyakinan ini adalah harga mati yang harus diperjuangkan tanpa bisa ditawar.⁸⁴

4.1.3 Awal Terbentuknya Komunitas Syi'ah Di Kabupaten Sampang

Pada bagian ini penulis akan menyampaikan bagaimana terbentuknya komunitas Syi'ah di Kabupaten Sampang sebelum membahas lebih lanjut kepada konflik berlatar belakang perbedaan keyakinan yang terjadi antara komunitas Sunni dan Syi'ah. Hal ini sangat penting sebagai langkah awal memahami dinamika konflik yang terjadi

⁸³ Wawancara bersama Bapak Faisol, Humas Kemenag Kabupaten Sampang dan Tokoh Muda PCNU Sampang, pada tanggal 18 September 2018.

⁸⁴ Ibid.

antara Komunitas Sunni dan Syi'ah di Kabupaten Sampang, Madura secara komprehensif.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub-bab terdahulu, bahwa mayoritas masyarakat Madura beragama Islam dengan Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan mayoritas di Pulau Madura tak terkecuali di Kabupaten Sampang. Masuknya Islam di Pulau Madura bermula dari kehidupan kecil, tidak seperti di Jawa, dimana Islam berkembang melalui pengaruh kerajaan atau keraton. Masyarakat Madura mengenal Islam dari pedagang-pedagang Asia Tenggara dan Gujarat yang singgah dipelabuhan sekitar Madura khususnya di Pelabuhan Kalianget, Sumenep. Dalam catatan Schrieke yang dikutip oleh De Jonge pada abad 15 Masehi penduduk pantai Selatan Sumenep telah mengenal Islam *ahlussunnah wal jamaah* yang dibawa oleh pedagang Islam dari Gujarat (India), Malaka, dan Palembang yang membawa ajaran. Meskipun tidak secara intensif, walisongo bukanlah penyebar pertama Islam di Pulau Madura, sebelum masa walisongo penduduk pesisir Kalianget telah mengenal Islam terlebih dahulu dari para pedagang. Barulah pada tahap-tahap penyebaran Islam dari wilayah pesisir hingga pedesaan peran ulama (walisongo) beserta murid-muridnya memegang peranan penting pada tahap perluasan ajaran ini. Pada tahap perluasan ajaran Islam di Pulau Madura Sunan Giri salah satu Walisongo mengutus dua muridnya, Sayyid Yusuf Al-Anggawi dan dan Sayyid Abdul Mannan Al-Anggawi untuk menyebarkan Islam ke Madura bagian barat dan bagian timur. Seiring dengan pesatnya perkembangan Islam di Madura, penyebaran Islam pada akhirnya sampai kepada elit keraton dan penguasa lokal. Salah satu penguasa lokal yang turut memeluk Islam adalah penguasa Sampang yaitu Lembu Petteng.⁸⁵

⁸⁵ Afif Amarullah, "Islam Di Madura". *Jurnal Islamuna, STAIN Pamekasan Madura*. Volume 2 Nomor 1, Juni 2015. Hlm 66

Dalam perkembangan Islam di Madura pengaruh budaya turut berpengaruh pada masa penyebaran Islam. Pengaruh budaya seperti upacara *palguna* (upacara tahunan pada masa kerajaan Majapahit) sebagai sarana pemersatu rakyat, diganti menjadi *grebek Maulid* yang puncak acaranya bertepatan pada tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal tiap bulan Hijrah. Selain itu masyarakat Madura memiliki ajaran keseimbangan hidup dalam menjaga hubungan kepada Allah dan sesama yang diungkapkan dalam *abantal Syahadat asapo' iman* (berbantal syahadat, berselimut iman) yang berarti agama harus menjadi sandaran, sedangkan dalam hubungan antar manusia orang Madura memiliki ungkapan *andhap asor* (rendah hati).

Selanjutnya, sejarah menyebarnya ajaran Syi'ah di Kabupaten Sampang terjadi pada awal 1980-an oleh Kiai Makmun seorang pemuka agama di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang setelah mendapatkan kabar dari sahabatnya yang belajar di Iran mengenai Revolusi Iran pada 1979. Keberhasilan revolusi di Iran tak lepas dari pengaruh ulama-ulama Iran dalam menumbangkan rezim Syah Reza Fahlevi, sebuah rezim monarki yang didukung oleh Amerika Serikat, menjadi sebuah awal momentum bagi segenap kaum muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia untuk menengok dan mempelajari faham Syi'ah. Hal inilah yang membuat Kiai Makmun terinspirasi oleh pemimpin revolusi Iran Ayatullah Rohullah Khomaini yang selanjutnya menjadi pendorong bagi Kiai Makmun untuk lebih dalam mempelajari ajaran-ajaran Syi'ah. Kiai Makmun pun menyadari bahwa mendakwahkan ajaran Syi'ah bukanlah suatu hal yang mudah. Sebab mayoritas ulama dan masyarakat Madura merupakan penganut *ahlus-sunnah wal jamaah* dan mayoritas *Nahdliyyin* (NU) yang fanitik. Oleh

karenanya kiai Makmun dalam mempelajari dan mendakwahkan ajaran Syi'ah dilakukan secara perlahan, dan cenderung tertutup.⁸⁶

Sebagai langkah awal kaderisasi dakwah Syi'ah di lingkungannya, Kiai Makmun meyekolahkan putra putrinya yaitu Tajul Muluk alias Ali Murtadha, Iklil Al-Milal, Roisul Hukama serta Umami Hani ke Pondok pesantren Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil, Pasuruan yang cenderung beraliran Syi'ah Ja'fariyyah. Pada tahun 1991 putra-putri Kiai Makmun telah kembali ke Sampang. Dari keempat putra-putri Kiai Makmun hanya Tajul Muluk yang melanjutkan studi ke Ma'had Sayyid Muhammad Al-Maliki di Arab Saudi pada tahun 1993. Akan tetapi Tajul tidak bertahan lama belajar di Ma'had Sayyid Maliki dan memilih bekerja sebagai TKI di Arab Saudi sambil belajar agama Islam secara autodidak. Pada saat menjadi TKI inilah ia bertemu dengan Muhammad Liwa' Al-Lahdi, warga negara Arab Saudi yang merupakan seorang mahasiswa Universitas King Abdul Aziz yang berpaham Syi'ah dari daerah Qatif, sebuah kota yang berbatasan langsung dengan Teluk Persia. Dari perkenalan inilah Muhammad Liwa' memberikan buku-buku Syi'ah untuk dipelajari oleh Tajul Muluk secara mandiri.⁸⁷

Sekembalinya dari Arab Saudi pada tahun 1999, Tajul Muluk kembali ke kampungnya di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kabupaten Sampang. Beberapa warga yang juga murid dari Kiai Makmun menyambut gembira kedatangan Tajul Muluk bahkan warga mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan pesantren. Pada tahun 2004 warga yang mengaji kepada Kiai Makmun dan Tajul Muluk bergotong royong membantu mendirikan rumah kediaman Tajul Muluk yang juga berfungsi sebagai pesantren dengan beberapa fasilitas penunjang seperti mushola, dan ruang kelas, pesantren kecil ini kemudian diberi nama Misbahul Huda,

⁸⁶ KontraS, *Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang*. (KontraS Surabaya, Surabaya, 2012) hlm. 3

⁸⁷ Wawancara dengan Ustadz Tajul Muluk di Rusun Puspoagro, Jemundo, Taman, Sidoarjo pada 17 Oktober 2018.

tenaga pengajarnya masih merupakan saudara Tajul Muluk yang sesama alumni Pesantren YAPI Bangil.⁸⁸

Metode dakwah Tajul Muluk dalam mengajarkan ajaran Syi'ah berbeda dengan Kiai Makmun ayahnya yang hati-hati dan tertutup dalam mendakwahkan ajaran Syi'ah, Tajul Muluk cenderung terbuka dan terang-terangan. Ditambah dengan sikap Tajul Muluk yang tegas, supel, cekatan dalam membantu warga yang kesusahan, serta tidak mau menerima imbalan dari warga setelah berceramah, menempatkan Tajul Muluk sebagai kiai muda yang dihormati dan disegani warga desa Karanggayam. Selain metode dakwah yang dilakukan oleh Tajul, ia juga memiliki program-program pengembangan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Madura seperti melakukan tradisi *tahlil mauludan* bersama-sama daripada dilakukan sendiri-sendiri karena dapat menjadi beban ekonomi bagi pelaksana tahlilan, Tajul juga menghimbau supaya para jamaahnya menyekolahkan anak mereka di SD Negeri/Inpres dengan alasan supaya anaknya bisa bersekolah lebih tinggi dan lebih baik adri orang tuanya, sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, tentu saja ini bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Madura yang menyekolahkan anaknya pada Madrasah atau Pesantren. Karena metode dakwahnya, sehingga dalam waktu sekitar tiga tahun, ratusan warga di dua desa di Kecamatan Omben yaitu Desa Karanggayam dan Desa Blu'uran menjadi murid Kiai Tajul Muluk dan pengikut ajaran Syi'ah.⁸⁹

Dari penjelasan mengenai perkembangan Syi'ah di Sampang, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya Syi'ah adalah ajaran yang tergolong baru di Madura, karena mulai masuk di awal dekade 80-an. Faktor yang menyebabkan ajaran Syi'ah dapat berkembang di Sampang karena adanya peran Kiai Makmun dan putra-putranya yang telah

⁸⁸ KontraS, *op.cit*, hlm 3

⁸⁹ Wawancara dengan Brigadir Polisi Eko Anggota Intelkam Polres Sampang dan LO Pengungsi Syiah di Rusun Puspoargo, Polres Sampang, 22 Oktober 2018

mempelajari ajaran Syi'ah sebelumnya. Sebagaimana diketahui, masyarakat Madura adalah masyarakat yang patuh kepada pemuka agama, sehingga amalan yang diajarkan oleh pemuka agama (ulama) selalu dianggap kebenaran dan wajib dijalankan. Hal ini akan berbeda jika Syi'ah berkembang bukan dari pemuka agama, maka perkembangannya akan cenderung lambat.

4.1.4 Rangkaian Peristiwa Konflik Sunni-Syi'ah di Kabupaten Sampang Madura

Memahami dinamika konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik sunni dan syi'ah itu sendiri pada ranah global maupun nasional. Perbedaan keyakinan dan pemahaman serta metode ajaran yang dikembangkan antara kedua aliran akan menunjukkan suatu benang merah konflik antar kedua aliran dalam Islam ini berakar. Telah dijelaskan diawal bahwa awal mula pertentangan antara Sunni dan Syi'ah dilatarbelakangi oleh pertentangan hegemoni politik pasca wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pembenaran doktrinal dalam Syi'ah muncul belakangan tatkala para pengikut Syi'ah merasa perlu untuk mendapatkan legitimasi keagamaan.⁹⁰

Untuk lebih memperjelas dalam memahami akar konflik yang terjadi antara penganut aliran Sunni dan Syi'ah berikut beberapa perbedaan mendasar yang menjadi penyebab pertentangan antara Sunni dan Syi'ah.

Tabel 4.2 Perbedaan antara aliran Sunni dengan Syi'ah

No	Variabel Perbedaan	Sunni	Syi'ah
1	Rukun Iman	Dalam keyakinan Sunni rukun Iman terdiri dari 6 hal yaitu : Iman kepada Allah,	Dalam keyakinan Syi'ah rukun Iman terdiri dari 5 hal yaitu : <i>At-Tauhid</i>

⁹⁰ Musahadi HAM dkk, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan* (Semarang, : Walisongo Mediation Center, 2007), hlm 62

		Iman kepada malaikat-Nya, Iman Kepada Kitab-Nya, Iman kepada rasul-Nya, Iman Kepada hari akhir, dan Iman kepada takdir	(mengesakan Tuhan), <i>An Nubuwwah</i> (Kenabian), <i>Al Imamah</i> (kepemimpinan atau ke-amiran), <i>Al Adlu</i> (keadilan), dan <i>Al Ma'ad</i> (percaya kepada hari kiamat) ⁹¹
2	Rukun Islam	Dalam ajaran Sunni rukun Islam meliputi 5 (lima) hal, yakni: membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, dan melaksanakan Haji	Dalam ajaran Syi'ah rukun Islam meliputi 5 hal, yakni : shalat, zakat, puasa, haji, dan <i>wilayah</i> , tanpa ada dua kalimat syahadat ⁹²
3	Syahadat	Dua kalimat Syahadat	Tiga kalimat Syahadat (ditambah menyebut 12 imam) ⁹³
3	Konsep <i>Imamah</i> (pemimpin)	<i>Imamah</i> atau <i>khilafah</i> dalam Sunni tidak termasuk dalam rukun Iman dan termasuk perkara <i>muamalah</i> yang pemilihannya ditentukan melalui musyawarah (<i>Syuro</i>)	Syi'ah menganggap imam sebagai utusan Allah sebagai pengganti kenabian dan termasuk dalam syarat keimanan mereka (rukun iman). Konsep imamah dalam Syiah mengharuskan imam berasal dari satu garis keturunan Ahlul bait (<i>keturunan nabi</i>) dan memiliki sifat

⁹¹ Ma'ruf Amin, et.all, Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia, (Jakarta, Gema Insani, 2013) hlm.81

⁹² Sulaiman, op.cit, hlm. 21

⁹³ Ma'ruf Amin, op.cit, hlm 90

			<i>ma'sum</i> (terbebas dari dosa) ⁹⁴
4	Pandangan ulama terhadap Kitab Suci Al-Qur'an	Ulama Sunni berpandangan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang terjaga keautentikannya hingga Kiamat.	Ulama Syi'ah berpandangan bahwa Al-Qur'an telah mengalami perubahan pasca wafatnya Rasulullah SAW. ⁹⁵
5	Pemaknaan terhadap <i>Ahlul Bait</i>	Sunni memaknai <i>Ahlul Bait</i> sebagai para sanak keluarga Nabi Muhammad yang senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunah Nabi.	Syi'ah mengkatagorikan <i>ahlul bait</i> kepada keluarga Ali bin Abi Thalib RA karena menikah dengan Fatimah putri nabi, sementara pada saat yang sama, mereka tidak memasukkan Usman bin Affan dan Umar Bin Khattab. ⁹⁶

Namun diantara perbedaan Sunni-dan Syi'ah memiliki perbedaan penulis mencoba mengemukakan beberapa persamaan. Diharapkan jika dapat ditemukan suatu titik temu, maka paling tidak dapat menghindarkan pemeluk *ahlussunnah* dan Syi'ah dari sikap saling menghina, mengkafirkan, yang selanjutnya dapat menjadi penengah dari perdebatan panjang selama ini antara *ahlussunnah* dan Syi'ah. Agar memperjelas dalam memahami titik temu antara penganut aliran Sunni dan Syi'ah berikut penulis uraikan beberapa persamaan antara Sunni dan Syi'ah.

⁹⁴ Bilal Muhammad 2015, "Inilah Perbedaan Prinsip Antara Sunni dan Syiah Terkait Imamah" kiblatsnews 18 Maret 2015 diakses melalui <https://www.kiblat.net/2015/03/18/inilah-perbedaan-prinsip-antara-sunni-dan-syiah-terkait-imamah/> diakses pada 10 Agustus 2018

⁹⁵ Slamet Mulyono, "Pergolakan Teologi Sunni-Syiah: Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi". *Jurnal Ulumuna*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 16 Nomor 2, 2012 diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/1779/10/Bab%203.pdf> diakses pada 10 Agustus 2018.

⁹⁶ Ibid, hlm 271.

Tabel 4.3 Persamaan antara aliran Sunni dengan Syi'ah

No	Variabel Perbedaan	Sunni	Syi'ah
1	Tauhid	Dalam pandangan <i>ahlussunnah</i> tauhid adalah tentang meng-Esa-kan dalam sifat, perbuatan, dan dzat-Nya.	Dalam hal Tauhid dan meng-Esa-kan Allah, Syiah sependapat dengan tauhid yang dikemukakan oleh <i>ahlussunnah</i> .
2	Kenabian	Ahlussunnah berkeyakinan bahwa nabi-nabi baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun tidak wajib diimani, dan merupakan utusan Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dari seluruh Nabi, yang terbebas dari salah dan dosa.	Ulama Syi'ah Syaikh Muhammad Husain Al-Ksyf al-Ghita, dalam bukunya <i>as-Syi'ah wa Ushuliha</i> , menuliskan bahwa Syiah mengimani seluruh Nabi yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, barangsiapa mengaku sebagai Nabi, setelah kenabian Nabi Muhammad adalah pendusta yang wajib dibunuh.
3	Al-Qur'an	Al-Qur'an adalah sebuah Mukjizat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk membedakan yang halal dan yang haram, dan tiada kekurangan didalamnya.	Masih dalam kitab yang sama (<i>as-Syi'ah wa Ushuliha</i>), Ulama Syi'ah Syaikh Muhammad Husain Al-Kasyf al-Ghita, meyakini apa yang diyakini oleh ahlussunnah. Syiah juga percaya bahwa semua yang tercantum dalam kitab Al-qur'an, ada yang bernilai mutlak seperti surga, neraka, timbangan amal, dan <i>shirath</i>

4	Hari Akhir	Ahlussunnah meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, Allah akan membangkitkan seluruh manusia untuk <i>dihisab</i> dan ditimbang amalannya	Dalam kitab yang sama (<i>as-Syi'ah wa Ushuliha</i>), ulama Syiah berpendapat bahwa Allah akan membangkitkan semua makhluk untuk ditimbang amalannya, lalu setiap makhluk akan dimintai pertanggung jawabannya selama hidupnya di dunia, ⁹⁷
---	------------	---	--

Ajaran Syi'ah telah berkembang lama di Indonesia, namun tidak ada catatan sejarah yang pasti kapan Syi'ah mulai masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya. Namun Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa Syi'ah mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad VIII masehi pada masa Dinasti Abbasiyah. Kala itu orang Hadramaut yang menganut ajaran Syi'ah datang ke Aceh untuk berdakwah. Namun mereka tidak menunjukkan dirinya Syi'ah mereka *bertaqiyah* (berpura-pura) menganut madzhab Syafi'i.⁹⁸

Perkembangan Syi'ah di Indonesia semakin marak pasca revolusi Iran pada 1979 dan kaum Syi'ah resmi memiliki negara yaitu Iran. Sejak kemenangan gerakan Syi'ah dalam revolusi Iran, membuat para aktivis Islam di Indonesia menaruh simpati terhadap Syi'ah. Figur Ayatullah Khomaeni menjadi idola dikalangan aktivis muda Islam di Indonesia. Buku-buku karya Ali Syari'ati seperti "Tugas Cendikiawan Muslim" yang menjadi inspirator gerakan revolusi Iran 1979 dibaca dengan penuh minat dan menjadi kajian-kajian aktivis Islam di Indonesia. Bahkan cendikiawan

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah ?Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta : Lentera Hati, 2007) hlm 93-95.

⁹⁸ Choirul Aminuddin, "Kisah Kang Jalal Soal Syi'ah di Indonesia", *Tempo* 29 Agustus 2012

Muhammadiyah, Amin Rais dengan sengaja menerjemahkan versi Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia.⁹⁹

Naiknya popularitas Syi'ah pasca revolusi Iran membuat khawatir dan was-was negara yang menjadi "musuh" bebuyutan Iran yaitu Saudi Arabia. Lewat lembaga bentukan pemerintah, Arab Saudi melakukan upaya untuk membendung perkembangan Syi'ah secara global dengan menerbitkan buku-buku anti-Syi'ah karya ulama klasik seperti Ibn Taimiyah (1263-1328) maupun ulama modern seperti Ihsan Ilahi Zahir, ulama Sunni dari Pakistan. Reaksi terhadap perkembangan Syiah di tanah air dilakukan melalui penyebaran isu negatif dan terbitnya buku-buku berisi tentang sikap penolakan terhadap Syiah. Anjuran mewaspadaikan aliran Syiah juga dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kala itu. Melalui Surat ketetapan MUI tanggal 7 Maret 1984 yang ditandatangani oleh Prof. K.H. Ibrahim Hosen selaku Ketua MUI kala itu, merekomendasikan tentang aliran Syi'ah yang isinya : Bahwa aliran Syi'ah sebagai salah satu aliran dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan *ahlus sunnah wal jama'ah* yang dianut oleh mayoritas Islam di Indonesia. Sehingga MUI menghimbau agar umat Islam meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham Syi'ah kedalam sendi-sendi kehidupan mayoritas *ahlus sunnah*.¹⁰⁰

Beberapa reaksi dan penolakan dari berbagai kalangan di Indonesia tak membuat surut para penganut Syi'ah di Indonesia yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di Universitas Qumm, Iran untuk mendakwahkan paham Syi'ah di Indonesia. Para penganut Syi'ah semakin terus terang untuk menunjukkan eksistensinya dengan mendirikan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Hadi di Pekalongan

⁹⁹ Moh. Hasim, "Syiah : Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia". *Jurnal Analisa Volume 19 Nomor 02, Juli-Desember 2012*. Melalui <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/253/211/> diakses pada 29 Oktober 2018.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 155

yang didirikan oleh Ustadz Ahmad Baraqbah, alumnus Universitas Qumm, Iran. Dan Habib Husain Al-Habsyi dari Bangil, Pasuruan, dengan mengubah haluan Pesantren Yayasan Pesantren Islam Indonesia (YAPI) yang didirikan pada tahun 1974 dari ideologi Ikhwanul Muslimin menjadi ideologi Syi'ah. Selain mendirikan Pondok Pesantren, kelompok Syi'ah juga aktif melalui kelompok diskusi, lembaga dakwah, dan yayasan. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh kelompok diskusi, yayasan dan lembaga dakwah inilah *syiar* aliran Syi'ah aktif berkembang. Setidaknya ada beberapa pusat gerakan Syi'ah di Indonesia diantaranya di Jakarta melalui Islamic Cultural Center (ICC), Pekalongan-Semarang melalui Ponpes Al-Hadi Pekalongan dan Yayasan Nurul Tsaqalain di Semarang, di Yogyakarta melalui Yayasan Raushan Fikr, di Pasuruan melalui Pondok Pesantren YAPI Bangil dan Yayasan Al-Itrah, serta di Bandung melalui organisasi Ikatan Jamaah Ahlul-Bait (IJABI). Selain di Jawa pusat kegiatan komunitas Syi'ah juga berada di Banjarmasin, Martapura, Balikpapan, Makassar, Palu dan Nusa Tenggara Barat.¹⁰¹

Semakin meningkatnya eksistensi ajaran Syi'ah yang diiringi dengan pelaksanaan ritual-ritual ibadah secara terang-terangan seperti perayaan 10 Syura/Muharram, dan ritual ibadah seperti doa *kumail*, maka ketegangan antara kelompok Sunni dengan Syi'ah pun semakin meningkat. Konflik terbuka pertama kali antara penganut Sunni dan Syi'ah terjadi pada 8 April tahun 2000 di Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Peristiwa ini dipicu oleh kekesalan warga karena sebenarnya Pondok Pesantren Al-Hadi yang telah dilarang melakukan kegiatan, namun pihak Pondok Pesantren Al-Hadi tidak mengindahkan larangan Kejari dan tetap melanjutkan kegiatannya. Ketika itu massa dari kelompok Sunni menyerang Pondok Pesantren Al-Hadi yang beraliran Syiah, peristiwa ini mengakibatkan 3 unit rumah di Pondok Pesantren Al-

¹⁰¹ K.H. Ma'ruf Amin, et.all, Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia, (Jakarta, Gema Insani, 2013) hlm.90

Hadi rusak akibat dibakar massa, 1 unit mobil dirusak dan 1 gudang material dibakar¹⁰²

Penolakan demi penolakan terjadi diberbagai kota di Pulau Jawa maupun diluar Pulau Jawa diantaranya di Bondowoso tahun 2006, di Sampang, Madura pada tahun 2007, di Pasuruan, pada tahun 2007, di Lombok, NTB pada tahun 2008, dan di Sampang, Madura pada tahun 2011 dan tahun 2012.¹⁰³ Bila mengamati konflik yang terjadi antara Sunni dan Syi'ah, menarik untuk mengamati konflik antara kedua aliran yang terjadi di Sampang Madura, setidaknya pernah terjadi konflik antara Sunni dan Syi'ah pada 2007, 2011 dan 2012 yang eskalasinya cenderung selalu meningkat pada setiap peristiwa konfliknya.

Konflik antara komunitas Sunni dan Syi'ah yang terjadi di Kabupaten Sampang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dakwah Syi'ah yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka oleh Tajul Muluk alias Ali Murtadha di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Dakwah ajaran Syi'ah oleh Tajul Muluk mendapat reaksi dari ulama setempat. Ditambah perkataan Tajul Muluk yang menyinggung Kiai setempat dengan menyebut mereka sebagai "kiai amplop", sebab sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Madura untuk memberikan *bisjarah* (tanda terima kasih) kepada kiai setelah memimpin doa, *selametan*, mauludan, dan urusan lainnya. Tajul melihat fenomena ini sebagai hal yang membebani masyarakat yang sebagian besar masih kesulitan finansial. Sehingga ia mengkritik kiai sebagai orang yang tidak mau mengerti keadaan masyarakat dan mementingkan isi perutnya sendiri. Hal tentu saja mendapatkan reaksi dari para kiai karena selain merasa terhina, juga memutus mata rantai penghasilan mereka.

Salah satu ulama yang berkeberatan dengan metode dakwah Syi'ah oleh Tajul Muluk adalah Kiai Ali Karrar Shinhaji, Pimpinan Pondok

¹⁰² *Ibid*, hlm.84

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 86-87

Pesantren Darut Tauhid, Lenteng, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan yang masih kerabat dekat dari Kiai Makmun (ayahanda Tajul). Dalam sebuah pertemuan yang bersifat kekeluargaan antara Kiai Karrar dengan Tajul Muluk dan saudara-saudaranya, Kiai Karrar menyampaikan keberatan dengan dakwah ajaran Syi'ah, bagi Kiai Karrar ajaran Syi'ah adalah ajaran yang menyimpang dan sesat yang bertentangan dengan *ahlus-sunnah wal jamaah* yang dianut oleh mayoritas Muslim di Madura. Keberatan juga tidak hanya datang dari Kiai Karrar saja, ulama setempat pun juga bersikap sama, akan tetapi mereka tidak bisa menghalang-halangi aktifitas dakwah yang dilakukan oleh Tajul Muluk karena masih menaruh rasa hormat kepada ayah Tajul Muluk yaitu Kiai Makmun. Namun pada Juni 2004 Kiai Makmun yang sebelumnya sakit akhirnya meninggal dunia. Pasca wafatnya Kiai Makmun maka tidak ada yang menghalangi para ulama di Omben untuk menentang aktivitas dakwah ajaran Syi'ah oleh Tajul Muluk dan saudara-saudaranya.¹⁰⁴

Pada pertengahan tahun 2005 para ulama beserta masyarakat di Omben melakukan deklarasi yang dipimpin oleh Kiai Karrar untuk menentang munculnya komunitas Syi'ah yang dipimpin oleh Tajul Muluk. Sejak deklarasi itu tindakan ujaran kebencian, penyesatan, dan penghakiman terus menerus diterima oleh Tajul Muluk beserta para pengikutnya. Upaya meminta klarifikasi atau *tabayyun* terkait dakwah ajaran yang dibawa oleh Tajul Muluk juga pernah dilakukan oleh para ulama di Madura dan dihadiri oleh Bupati Sampang kala itu Bapak H. Fadhilah Budiono dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang Bapak Imron Rosyidi bertempat di kediaman almarhum H. Sya'bi, seorang tokoh masyarakat Sampang pada tanggal 24 Februari

¹⁰⁴ KontraS, *Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang*. (KontraS Surabaya, Surabaya, 2012) hlm. 3

2006. Pertemuan ini batal dilakukan karena Tajul Muluk tidak hadir dan diagendakan kembali pada tanggal 26 Februari 2006.¹⁰⁵

Dalam pertemuan lanjutan pada 26 Februari 2006 bertempat di masjid Landeko' Karanggayam yang dihadiri oleh para Ulama Sampang dan Pamekasan yang tergabung dalam Forum Musyawarah Ulama (FMU) Madura, Ketua MUI, Kapolsek Omben dengan agenda mendengarkan penjelasan Tajul Muluk. Tajul Muluk yang hadir saat itu menjelaskan bahwa ajaran Syi'ah yang dia dakwahkan bukanlah ajaran sesat seperti yang dituduhkan, namun ajaran Syi'ah juga merupakan madzhab dalam Islam yang tidak perlu dipertentangkan sehingga ia enggan untuk keluar dari Syi'ah. Buah dari sikap Tajul FMU akhirnya mengeluarkan keputusan yang isinya : 1). Mengajak pimpinan Syi'ah untuk kembali ke ajaran ahlus-sunnah agar tidak terjadi konflik pemikiran dan bentrok fisik di kalangan masyarakat awam, 2). FMU Tidak bertanggung jawab atas akibat dari keputusan Tajul yang enggak kembali kepada ajaran ahlus-sunnah dan menyerahkan permasalahan ini kepada aparat yang wajib, 3). Menghimbau kepada MUI di empat Kabupaten di Madura untuk memfatwakan sesat aliran syi'ah. Bersamaan dengan itu, ratusan massa telah mengepung dusun Nangkernang dan Pondok Pesantren Misbahul Huda, tidak ada kekerasan fisik terjadi, namun ribuan massa tersebut melakukan persekusi kepada penganut Syi'ah di Pondok Pesantren Misbahul Huda.¹⁰⁶

Pada 9 April 2007 Tajul bersama santri-santrinya mengadakan peringatan maulid nabi yang akan dilaksanakan di pesantrennya dengan mengundang sejumlah ustadz dan *ikhwan Syi'ah* dari luar Sampang. Sebelum acara maulidan dimulai ribuan massa yang datang dari wilayah Kecamatan Robatal, Karangngpenang dan Omben dengan bersenjatakan kayu dan senjata tajam telah mengepung jalan masuk menuju desa

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 3

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ustadz Tajul Muluk dan Ustadz Ikilil Al-Milal, di Rusun Puspoagro, Jemundo, Taman, Sidoarjo pada 17 Oktober 2018

Karanggayam. Massa melakukan sweeping kepada setiap kendaraan yang datang serta meminta Kia Tajul Muluk untuk tidak menyebarkan ajaran Syi'ah dan kembali kepada *ahlussunah wal jamaah*.¹⁰⁷ Untuk menghindari jatuhnya korban aparat TNI dan Polri diturunkan untuk menjaga keamanan disekitar Pesantren Misbahul Huda. Acara mauludan tetap berlangsung dengan pengawasan aparat TNI / Polri. Pada Juni 2007 ditengah meningkatnya ancaman terhadap pengikut Syi'ah di Sampang Tajul Muluk diangkat sebagai Ketua Pengurus daerah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Sampang.¹⁰⁸

Dalam suasana ramadhan pada 26 Oktober 2009 bertempat di Mapolres Sampang beberapa instansi terkait di Kabupaten Sampang diantaranya dan PCNU Sampang yang tergabung dalam PAKEM (Pengawasan Aliran dan Kepercayaan) mengundang Tajul Muluk untuk melakukan klarifikasi mengenai aliran yang diajarkannya di lingkungan desa Karanggayam. Dalam kondisi tertekan Tajul Muluk akhirnya menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa dirinya bersedia untuk menghentikan aktivitas dakwah dan ritual ibadah Syi'ah di Sampang. Dalam pertemuan tersebut juga dibuat MoU bersama yang isinya :

- (1) Bahwa Tajul Muluk tidak diperbolehkan lagi mengadakan ritual dan dakwah yang berkaitan dengan aliran syiah karena sudah meresahkan warga.
- (2) Bahwa Tajul Muluk bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran aliran tersebut di Kabupaten sampang.
- (3) Bahwa apabila tetap melakukan ritual dan / atau dakwah maka Tajul Muluk siap untuk diproses secara hukum yang berlaku.
- (4) Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM di Kabupaten Sampang akan selalu memonitor dan mengawasi aliran tersebut.
- (5) Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM siap untuk meredam gejolak masyarakat baik yang bersifat dialogis atau anarkis selama yang bersangkutan (Tajul Muluk) menaati kesepakatan di poin (1) dan (2). Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh MUI Kab.

¹⁰⁷ Polres Sampang, "Paparan Kronologis Peristiwa Tanggal 29 Desember 2011 di Omben Kab. Sampang Jawa Timur"

¹⁰⁸ KontraS, *op.cit.* hlm 5

Sampang, Ketua DPRD Kab. Sampang, Ketua PCNU Kab. Sampang, Depag Kab. Sampang, Kepala Bakesbangpol Kab. Sampang serta tokoh Ulama' / Da'i kamtibmas.¹⁰⁹

Dengan adanya surat pernyataan bersama ini menjadi legitimasi bagi pihak yang anti terhadap keberadaan jamaah Syi'ah untuk menyerang Tajul Muluk dan pengikutnya bila mereka menjalankan aktivitas keagamaan disusul munculnya ujaran kebencian yang tersebar melalui majelis pengajian, surau dan masjid. Akibatnya masyarakat desa Karanggayam terpecah menjadi dua kelompok yang saling berhadapan antara pengikut jamaah Syi'ah beserta keluarganya dan jamaah Sunni beserta keluarganya. Suasana desa seperti dalam kondisi perang dingin yang setiap saat berubah menjadi konflik terbuka. Dalam kehidupan sehari-haripun telah terjadi disharmonis antara pemeluk Sunni dan Syi'ah di Desa Karanggayam dan Desa Blu'uran. Warga Sunni sering mencemooh warga Syi'ah, jamaah Sunni tidak mau menerima pemberian makanan dari kelompok Syi'ah, Ketika disapa tidak membalas, dan ada yang berujung hingga perceraian karena suaminya mengikuti ajaran Syi'ah sedangkan istrinya tidak.¹¹⁰

Ditengah-tengah ancaman persekusi terhadap para pengikut aliran Syi'ah, pada awal tahun 2010 terjadi perselisihan internal keluarga antara Tajul Muluk dan adiknya Roisul Hukama. Perselisihan ini disebabkan karena Tajul Muluk telah menikahkan santri Rois yang bernama Halimah dengan tetangga Tajul bernama Abdul Basit tanpa sepengetahuan Rois. Rois marah karena merasa tidak dihormati, karena Rois sebagai guru Halimah maka seharusnya dialah yang menikahkan Halimah bukan Tajul Muluk. Tajul pun membela dengan alasan bahwa Abdul Basit-lah yang memintanya untuk menyampaikan lamaran Abdul Basit kepada Halimah

¹⁰⁹ Polres Sampang, *Op.cit.* hlm 11

¹¹⁰ Wawancara dengan Ustadz Tajul Muluk dan Ustadz Ikilil Al-Milal, di Rusun Puspoagro, Jemundo, Taman, Sidoarjo pada 17 Oktober 2018

dan orangtuanya.¹¹¹ Namun Brigadir Polisi Eko anggota Reskrim yang juga sebagai LO pengungsi Syi'ah di Jemundo mengungkapkan :

“Bahwa sesungguhnya kemarahan Roisul bukan karena merasa tidak dihormati karena Tajul menikahkan Halimah namun karena ternyata Roisul juga menaruh hati kepada Halimah dan berencana akan menikahinya. Setelah kejadian ini Rois menaruh dendam kepada Tajul dan keluarganya termasuk ibundanya dan ia menyatakan keluar dari Syi'ah serta berbalik bersikap memusuhi Tajul dan pengikutnya serta ajaran Syi'ah yang dibawa Tajul. Ia pun sangat antusias menyebarkan ujaran kebencian, isu tentang Syiah dan kesesatannya serta memprovokasi supaya Tajul Muluk dan para pengikutnya di usir dari Desa Karanggayam”.¹¹²

Akibat adanya provokasi yang gencar yang dipelopori oleh Roisul Hukama, pada akhirnya tuntutan para ulama di Madura hanya ada dua opsi, Tajul Muluk harus keluar dari desanya atau kembali ke ajaran *ahlus-sunnah wal jamaah*. Pada Februari 2011 Tajul beserta jamaahnya kembali melakukan peringatan Maulid Nabi dipesantrennya. Seperti kejadian pada tahun 2007 massa melakukan pengepungan dan menutup jalan masuk menuju Desa Karanggayam. Jumlah massa yang datang berasal dari lima desa di Kecamatan Omben. Dalam peristiwa ini Bassra (Badan Silaturrahi Ulama Madura) mengaku bertanggungjawab sebagai pihak yang mengerahkan massa, pelopor pengepungan ini salah satunya adalah Roisul Hukama. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan aparat keamanan disiagakan menjaga kediaman Tajul Muluk. Massa menuntut agar Tajul Muluk dan pengikutnya kembali kepada ajaran Sunni sembari menandatangani petisi penolakan. Tidak terjadi tindakan anarkis dalam peristiwa itu. Namun pada 2 April 2011 massa kembali mendatangi kediaman Tajul Muluk dan mengancam untuk membakar kediaman dan pesantren Tajul jika Tajul tidak segera meninggalkan Desa Karanggayam. Merespon tuntutan massa dan dengan alasan keamanan Polisi mengevakuasi Tajul Muluk ke Mapolres Sampang. Selama di Polres

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Wawancara dengan Brigadir Polisi Eko Anggota Intelkam Polres Sampang dan LO Pengungsi Syiah di Rusun Puspoargo, Polres Sampang, 22 Oktober 2018

Sampang, Tajul ditempatkan di rumah dinas Wakapolres Sampang, merasa tidak nyaman karena diperlakukan seperti tahanan rumah Tajul memutuskan untuk pergi sementara waktu ke Kota Malang. Keputusan Tajul tersebut didukung oleh Polres Sampang dan Pemkab Sampang. Begitu pula Pemerintah Provinsi Jatim juga mendukung dengan mengalokasikan biaya hidup bagi Tajul selama satu tahun. Dalam hal ini Pemkab Sampang memberikan bantuan sebesar Rp 10.000.000,- yang diserahkan diserahkan pada 8 Agustus 2011 dan Pemprov Jatim menyerahkan bantuan sejumlah sebesar Rp 50.000.000,- juta rupiah yang diserahkan pada 15 agustus 2011.¹¹³

Selama berada di Malang, Tajul Muluk beberapa kali kembali ke rumahnya di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben. Kepulangannya ke desanya dianggap masyarakat Sunni Tajul akan kembali mengajarkan ajaran Syi'ah. Ratusan massa kembali mengepung rumahnya dan mengancam membakar rumah Tajul. Untuk kedua kalinya Polres Sampang mengamankan Tajul di Mapolres Sampang. Merasa tidak betah di Mapolres ia kembali lagi ke Malang. Diawal ramadhan tahun 2011 Tajul kembali lagi ke desanya secara diam-diam untuk merayakan awal ramadhan bersama keluarganya. Kedatangannya ke Karanggayam diketahui polisi, dan akhirnya polisi menjemput Tajul dan mengantarkannya keluar desa.¹¹⁴

Situasi kondusif pasca keluarnya Tajul dari Desa Karanggayam hanya berlangsung beberapa bulan saja. Selagi Tajul masih berada di Malang pada tanggal 17 Desember 2011 ratusan massa membakar rumah Muhammad Sirri, warga Syi'ah yang menjadi murid Tajul Muluk, massa beralasan rumah tersebut digunakan sebagai persembunyian Tajul. Massa juga beralasan bahwa Tajul telah melanggar perjanjian untuk

¹¹³ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dokumen Rangkaian Peristiwa Omben-Sampang, 2012. Hlm. 3

¹¹⁴ KontraS, *Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang*". (KontraS Surabaya, Surabaya, 2012) hlm. 9

tidak kembali ke Karanggayam selama satu tahun selama menjalani pengasingan di Malang. Dua minggu kemudian setelah kejadian tersebut, pada tanggal 29 Desember 2011 sekitar 500-an massa membakar rumah dan pesantren Tajul hingga rata dengan tanah, polisi dari Polsek Omben yang berjaga di lokasi tidak mampu mencegah aksi massa karena kekuatan yang tidak sebanding dengan massa yang begitu masif dengan bersenjata bambu runcing, parang, clurit dan bom molotov. Setelah membakar pesantren Misbahul Huda dan kediaman Tajul Muluk, massa bergerak untuk merusak dan membakar rumah Iklil, dan Saiful yang berlainan dusun. Aksi massa mereda setelah polisi menurunkan aparat gabungan dari Polres Sampang dibantu satu SSK dari Brimob Pamekasan.¹¹⁵

Khawatir kejadian akan meluas kepolisian mengungsikan warga pengikut Syi'ah yang berjumlah 253 jiwa ke GOR Indoor Sampang. Dalam peristiwa ini Polisi menetapkan satu orang tersangka atas nama Musrika (40 tahun) dengan vonis 3 bulan sepuluh hari, lebih ringan dari tuntutan jaksa 5 bulan penjara. Selama berada di lokasi pengungsian, para pengungsi selalu dibayang-bayangi isu penyerangan GOR Sampang oleh massa penolak ajaran Syiah. Setelah bertahan kurang lebih selama dua minggu di GOR Sampang, pada 12 Januari 2012 para jamaah Syiah dipulangkan paksa oleh Pemkab Sampang tanpa menyertakan Tajul Muluk, Iklil Al-Milal, Syaiful dan Ali.¹¹⁶

Dalam rapat internal MUI Sampang pada 1 Januari 2012 dan rapat di PCNU tanggal 2 Januari 2012 memutuskan bahwa ajaran yang dibawa Tajul Muluk sebagai penodaan agama sehingga menimbulkan keresahan warga. Peristiwa yang terjadi pada 29 Desember itu terjadi bukan lantaran masyarakat sunni yang bertindak radikal, peristiwa tersebut dinilai akibat

¹¹⁵ Keterangan Kompol Alvian Nurrisal, Wakapolres Sampang dalam dalam Indonesia Lawyers Club "Syiah Diusir Negara Kemana", Tayang pada 25 Juni 2013. Indonesia Lawyers Club. TV One : Jakarta.

¹¹⁶ Ibid, hlm 11

dari keresahan masyarakat atas penyebaran ajaran Syiah Tajul. Diikuti dengan keluarnya Fatwa MUI Jatim No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah. Fatwa MUI ini muncul seterah terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat Di Jawa Timur. Sehingga MUI dan PCNU Sampang perlu melaporkan Tajul Muluk atas dasar penodaan agama dan harus segera diadili. Tanggal 12 Juli 2012 Pengadilan Negeri Sampang telah memutuskan Tajul Muluk terbukti bersalah dan telah melakukan penodaan agama Islam serta dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara.¹¹⁷

Konflik sosial selanjutnya terjadi pada 26 Agustus 2012 (yang dalam rilis pemerintah disebut Peristiwa Omben II), satu minggu setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1433 H. Ditengah suasana Idul Fitri dan masyarakat Madura memperingati *ba'da kupa*t sebuah perayaan untuk menutup Idul Fitri. Warga Sampang dikejutkan oleh penyerangan terhadap warga Syi'ah di Desa Karanggayam. Peristiwa ini dipicu karena rombongan anak-anak para pengikut aliran Syiah yang dipondokkan di YAPI Bangil dan Pondok Al-Hadi Pekalongan yang berjumlah 30-an orang, akan kembali ke Pondok setelah melaksanakan libur Idul Fitri sekaligus akan menjenguk Kiai Tajul Muluk, dihadap oleh sekelompok warga Desa Karanggayam yang dipimpin oleh Rois, mereka diingatkan agar kembali kerumah dengan alasan tidak ingin aliran Syi'ah berkembang di Kecamatan Omben. Dalam penghadangan salah satu warga Syi'ah mengeluarkan clurit sambil mengolok-olok kelompok Sunni yang melakukan penghadangan. Hal ini memancing kemarahan dan emosi para warga Sunni dan sebagian warga terprovokasi memanggil warga lainnya provokasi juga dilakukan melalui pengeras suara di masjid dan surau di desa Karanggayam dan desa Blu'uran tidak ada data yang pasti berapa banyak warga yang berbondong-bondong menuju bekas

¹¹⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dokumen Rangkaian Peristiwa Omben-Sampang, 2012. Hlm. 3

pesantren dan kediaman Tajul Muluk. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Kapolsek dan Danramil Omben beserta jajaran turun ke lapangan namun massa yang datang bergelombang tidak mampu membendung kemarahan warga Sunni yang terlanjur terprovokasi, bahkan Kapolsek Omben pun terluka oleh lemparan massa dari kedua belah pihak.¹¹⁸

Dilain pihak, kelompok Syiah yang bertahan di bekas pesantren Tajul Muluk juga telah mempersiapkan diri dengan senjata tajam, batu dan bom molotov akhirnya bentrokan antar kedua kelompok tak dapat dihindarkan. Akibat bentrokan ini dilaporkan satu orang meninggal dunia dari pihak Syi'ah atas nama Bapak Hamamah (55 tahun), 8 Orang luka-luka, sedangkan dua lainnya kritis. Kerugian materiil yang timbul akibat peristiwa tersebut 39 rumah/KK dan 2 mushola terbakar. Polisi menetapkan 8 orang tersangka yang diduga otak dari tindakan anarkis tersebut. Aparat gabungan dari TNI dan Polri sejumlah lima SSK dari Polri dan dua SSK dari TNI AD segera diturunkan untuk melakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Para korban yang berjumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) jiwa segera dievakuasi dari lokasi kejadian ke GOR Wijaya Kusuma Sampang. Selanjutnya Polisi menetapkan 8 tersangka dalam peristiwa ini salah satunya adalah Roisul Hukama yang diduga sebagai aktor intelektual dalam Peristiwa Omben II.¹¹⁹

Konflik yang terjadi pada 26 Agustus 2012 (peristiwa Omben II) tidak terjadi begitu saja. Ditengarai ada faktor politik ikut didalamnya, dinamika politik di Sampang memang selalu bergejolak setiap Pemilukada.¹²⁰ Dimana pada saat momentum Pemilukada pada 2012

¹¹⁸ MUI Jawa Timur, Kronologis Bentrokan Antar Syi'ah Sunni di Sampang Pada 26 Agustus 2018. Hlm 1

¹¹⁹ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dokumen Rangkaian Peristiwa Omben-Sampang, 2012. Hlm. 4-5

¹²⁰ Hanya Kabupaten Sampang yang pada Pemilukada pada Juni 2018 lalu dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Sampang, PSU dilaksanakan pada 27 Oktober 2018 lalu.

salah satu kandidat calon kepala daerah menggunakan kasus Syi'ah sebagai bahan kampanye untuk menarik simpati massa. Salah satu calon yang merupakan calon *incumbent* turut menggandeng salah satu aktor konflik yang juga merupakan kiai. Semua pasangan calon mendapatkan dukungan dari partai politik yang didalamnya terdapat ulama. Dan saat itu kalangan kiai pun terpecah menjadi 2 kubu yang bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang keduanya merupakan partai Islam dengan warga *nahdliyyin* didalamnya.¹²¹

Dalam laporannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak ada rencana untuk melakukan relokasi kepada para pengungsi, namun lebih mendorong untuk menciptakan suasana rukun, damai, dan guyub antara pemeluk Sunni dan Syi'ah.¹²² Namun setelah menempati GOR Wijaya Kusuma Sampang selama 10 bulan (Agustus 2012-Juni 2013) para pengungsi yang berjumlah 64 Kepala Keluarga dipindahkan secara paksa keluar dari Sampang dan dibawa menuju Rusunawa Puspoagro, Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dengan alasan GOR akan digunakan untuk acara istighosah keesokan harinya.¹²³

4.1.5 Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Penanganan Konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura Dalam Peristiwa Omben I

Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan konflik bernuansa agama antara Penganut Sunni dan Syi'ah di Sampang Madura sudah terlihat sebelum Peristiwa Omben I yang terjadi pada 29 Desember 2011, penanganan dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Sampang dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti Bakesbangpol

¹²¹ Febrihada Gahas CM, "Memahami Dinamika Konflik Syi'ah Sampang dan Kegagalan Upaya Rekonsiliasi ", Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2015

¹²² *Op.Cit*, hlm 8

¹²³ Keterangan Ikliil Al-Milal dalam Indonesia Lawyers Club "Syiah Diusir Negara Kemana", Tayang pada 25 Juni 2013. Indonesia Lawyers Club. TV One : Jakarta.

Kabupaten Sampang, Polres Sampang, Kodim 0828 Sampang, Kejari Sampang, Kemenag Sampang beserta perwakilan MUI, Forum Kiai dan PCNU Sampang untuk melakukan berbagai mediasi dan dengar pendapat dengan pimpinan Syiah, Tajul Muluk agar tidak terjadi gejolak di masyarakat Sampang khususnya di Kecamatan Omben dengan adanya ajaran Syi'ah yang disebarkan oleh Tajul Muluk yang dilakukan pada :

- 1) Dengar pendapat yang difasilitasi oleh Forum Musyawarah Ulama Madura pada 26 Februari 2006 bertempat di rumah Kiai Nawawi (Kakek Tajul Muluk) yang dihadiri oleh Camat Omben, Kapolsek Omben, Tokoh Masyarakat Omben dan pimpinan pesantren dengan menghadirkan Tajul Muluk. Dalam pertemuan ini Tajul menegaskan bahwa ajaran Syi'ah yang dibawanya bukan ajaran sesat dan merupakan salah satu madzhab dalam Islam.
- 2) Pada 26 Oktober 2009 bertempat di Mapolres Sampang beberapa instansi terkait yang tergabung dalam PAKEM (Pengawasan Aliran dan Kepercayaan) Kabupaten Sampang yang beranggotakan: Ketua DPRD Sampang, Kapolres Sampang, Kajari Kemenag sampang, Sampang, KaKesbangpol Sampang, Kasie Pidsus Kejari Sampang, Kodim Sampang, MUI Sampang, PCNU Sampang dan juga dihadiri oleh Muspika Kecamatan Omben beserta perwakilan ulama memanggil kembali Tajul Muluk untuk dimintai keterangan, namun forum ini menjadi forum penghakiman bagi Tajul dengan hasil mengeluarkan surat pernyataan yang intinya Tajul Muluk harus menghentikan kegiatan dakwah ajaran Syi'ah agar masyarakat tidak bertindak anarkis terhadap Tajul beserta jamaahnya.¹²⁴
- 3) Bakesbangpol Kabupaten Sampang mencatat beberapa rangkaian peretemuan untuk merespon situasi di desa Karanggayam yang semakin memburuk, pertemuan itu diuraikan sebagai berikut :

¹²⁴ Polres Sampang, "Paparan Kronologis Kasus Syiah Sampang"

- a) Pada 4 April 2011, Pemkab Sampang bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Muspika Kecamatan Omben, Muspika Kecamatan Karangpenang, Pemuka agama di kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang. Dalam pertemuan ini masyarakat menolak ajaran syi'ah yang dibawa oleh Tajul dan mengeluarkan rekomendasi untuk merelokasi sementara Tajul Muluk dan keluarganya keluar dari Desa Karanggayam untuk dilakukan kondusifitas dan Melakukan pendekatan kepada Roisul Hukama dan pengikutnya untuk menahan diri sehingga tidak terseret kepada konflik horizontal.
- b) Pada 5 April 2011, dilakukan pertemuan dengan Kapolda Jawa Timur Irjen (Pol). Untung S. Rajab dengan ulama se-Kabupaten Sampang untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam peretemuan itu ulama meminta supaya polisi ikut mendukung rencana relokasi Tajul Muluk dan keluarganya.
- c) Pada 7 April 2011, dilakukan rapat koordinasi Kominda Kabupaten Sampang dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Sampang yang menghasilkan keputusan: Agar Tajul Muluk segera direlokasi keluar Desa Karanggayam, Omben (Sebagian peserta rapat meminta agar Tajul diasingkan keluar Pulau Madura)
- d) Pada 10 April 2011, bertempat di rumah dinas camat Omben diadakan pertemuan dengan Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang, Muspika Kecamatan Omben, Muspika Kecamatan Karangpenang, Roisul Hukama, Kades Omben, Toga dan Tomas Desa Omben yang pada intinya warga desa Karanggayam menolak keberadaan komunitas Syi'ah yang dibawa oleh Tajul Muluk dan menolak segara bentuk aktifitas dakwah ritual ibadah Tajul dan jamaahnya di Desa Karanggayam.

- e) Pada 11 April 2011 para ulama berkumpul di Ponpes Darul Ulum, Gersempal, Kecamatan Omben dihadiri oleh pejabat Kabupaten Sampang dan Kapolres Sampang yang pada intinya menghasilkan kesepakatan: Bahwa Polres Sampang mendukung rekomendasi merelokasi Tajul Muluk keluar dari Sampang, Masyarakat tidak diperkenankan bertindak anarkis, Diharapkan para pihak menjalankan fungsinya untuk menjaga situasi kondusif di Kabupaten Sampang.
- f) Sementara itu pada tanggal yang sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pengurus IJABI Wilayah Jatim di hotel AGIS Surabaya, Pertemuan itu menghasilkan keputusan : Kasus antara Sunni Syiah sebenarnya berlatar belakang keluarga yang merambat kepada masalah keyakinan, Pemerintah meminta IJABI untuk turut serta mendamaikan Tajul Muluk dan Roisul Hukama karena keduanya masih tercatat sebagai pengurus IJABI Cabang sampang.
- g) Tanggal 30 April di Dinas Sosial Malang, Asisten I Gubernur Jawa Timur bersama pengurus IJABI Jawa Timur dan Tajul Muluk yang pada intinya Pemprov Jatim akan menanggung biaya sewa rumah selama Tajul direlokasi ke Malang sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan biaya hidup Tajul selama di Malang yang nilainya masih belum ditentukan.
- h) Pada tanggal 30 Mei 2011 diadakan pertemuan antara asisten I Pemprov Jawa Timur beserta Pejabat Pemerintah Kabupaten Sampang, Polres Sampang, Kodim Sampang, Ketua MUI Sampang, Kemenag Sampang yang membuahkan hasil : Pemerintah provinsi akan memfasilitasi anggaran relokasi Tajul Muluk dari Desa Karanggayam Ke Malang, dan Pemerintah

Kabupaten Sampang melakukan pendekatan kepada Tajul agar mau dipindahkan sementara ke Malang Jawa Timur.¹²⁵

- 4) Sehari pasca Peristiwa Omben I tanggal 29 Desember 2011, Pemkab Sampang, DPRD, Aparat keamanan, MUI Sampang, PCNU Sampang melakukan koordinasi terkait solusi peristiwa Omben I. Solusi yang direncanakan adalah Pemkab Sampang berencana memilah-milah semua jamaah Syiah yang fanatik dan yang tidak. Untuk jamaah yang fanatik direncanakan akan ditransmigrasikan keluar Pulau Madura

Dari data diatas proses penanganan konflik sebelum kejadian dan pasca kejadian Peristiwa Omben I Pada 29 Desember 2011 dan setelah jamaah Syi'ah diungsikan selama tiga minggu di GOR Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Sampang beserta stakeholder terkait sejak awal mencari jalan keluar kasus konflik Sunni dan Syi'ah di Sampang ini dengan mengedepankan relokasi daripada rekonsiliasi.

Pasca peristiwa konflik Sunni Syiah pada 29 Desember 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera bertindak untuk membantu para pengungsi yang saat itu dievakuasi di GOR Sampang dengan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 250.000.000,-, Pengadaan air bersih, peralatan tidur dan MCK di lokasi pengungsian, Membangun kembali rumah yang dibakar massa bersamaan dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Desa Karanggayam, Pemprov Jawa Timur menjadi fasilitator bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Karanggayam dan Bluuran untuk menjaga kerukunan dan menjaga situasi tetap kondusif, Memfasilitasi rapat antara Tajul Muluk, Pemkab Sampang, Pemprov Jatim dan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang.

¹²⁵ KontraS, *Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang*. (KontraS Surabaya, Surabaya, 2012) hlm. 12

4.1.6 Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Penanganan Konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura Dalam Peristiwa Omben II

Pasca terjadinya konflik Omben II pada 26 Agustus 2012 Pemerintah Kabupaten Sampang dan Polres Sampang segera melakukan evakuasi korban konflik yang berjumlah 269 (duaratus enam puluh sembilan) orang yang terdiri dari pengungsi laki-laki 66 orang, perempuan 77 orang, anak-anak 96 orang dan balita 36 orang, menghadapi bertambahnya pengungsi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk kenyamanan dan keamanan para pengungsi seperti fasilitas MCK, tempat ibadah, penerangan, dan lain-lain.

Upaya pemulihan keamanan pascakonflik pun dilakukan oleh unsur gabungan TNI dan POLRI. Posko Keamanan didirikan di lokasi konflik dengan dipimpin langsung Karoops Polda Jawa Timur. Polisi menetapkan 8 tersangka dalam konflik ini salah satunya adalah Roisul Hukama yang diduga aktor intelektual dibalik peristiwa Omben II ini. Polisi dibantu unsur TNI melaksanakan pengamanan terhadap 5 rumah yang tidak terbakar untuk penyelamatan harta benda korban konflik selama berada di pengungsian. Polisi juga melakukan operasi razia senjata tajam dan menurunkan tim identifikasi yang terdiri dari Tim Dokkes, Labfor dan Gegana guna pengumpulan barang bukti.¹²⁶

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga telah mengerahkan sukarelawan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dengan mendirikan dapur umum dan mendistribusikan bantuan diantaranya 200 lembar sarung, 200 lembar selimut, 150 dus mie instan, 50 potong pakaian muslim, 20 paket perlengkapan bayi, 50 paket perlengkapan makan, 50 paket perlengkapan mandi, 1800 kaleg sarden, 100 botol minyak goreng, 50 lembar tikar, 200 potong kain panjang.

¹²⁶ Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Slide Penanganan Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura

Bantuan tersebut ditujukan sebagai respon masa darurat selama satu minggu. Jika masa darurat diperpanjang, pemerintah akan menambah bantuan terutama untuk kebutuhan pokok. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 700 juta untuk penanganan pengungsi.¹²⁷

Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur dan Forpimda Kabupaten Sampang bersama-sama datang ke TKP di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben untuk meninjau lokasi konflik dan mengendalikan situasi agar situasi tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan tidak ada rencana untuk melakukan relokasi para pengungsi, pemerintah Provinsi mendorong untuk terciptanya suasana guyub, rukun, dan damai di Kabupaten Sampang.¹²⁸

Pada keesokan harinya, tanggal 27 Agustus 2012 bertempat di Kantor Gubernur Jawa Timur Pemerintah Jawa Timur Forkopimda Provinsi Jawa Timur bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN melakukan pertemuan untuk tindak lanjut penanganan konflik Sampang. Sehari setelahnya, pada 28 Agustus 2012 Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN meninjau lokasi konflik di Desa Nangkernang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Selain itu beberapa lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan LPSK. Selain beberapa komisi dan lembaga pemerintah, konflik Sampang juga mendapat perhatian dari berbagai lembaga swadaya masyarakat baik nasional dan internasional seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), PUSAD Paramadina, Lakpesdam NU, dan Amnesty Internasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga merencanakan program pengembangan masyarakat untuk masyarakat di Kecamatan Omben

¹²⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dokumen Rangkaian Peristiwa Omben-Sampang, 2012. Hlm. 5

¹²⁸ Ibid, Hlm 6

khususnya, karena Kecamatan Omben dan Karangpenang termasuk daerah terpencil, dengan tingkat SDM dan tingkat sosial ekonomi yang rendah, terbatasnya infrastruktur sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan perhatian khusus dengan mencanangkan program-program : Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, Pengembangan infrastruktur sampai tingkat desa, Penyediaan fasilitas air bersih, Rehab rumah tak layak huni dalam program TMMD, dan Rehab kantor desa.

4.1.7 Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Penanganan Konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura Pasca Peristiwa Omben II (2013) Sampai Sekarang (2018)

Pada Juni 2013 setelah para pengungsi Syi'ah menempati GOR Sampang selama 10 Bulan, para pengungsi yang berjumlah 349 jiwa atau 64 Kepala keluarga dari Sampang dan dibawa menuju Rusunawa Puspoagro, Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Jawa Timur mengatakan bahwa pemindahan ini bersifat sementara namun tidak ada keterangan resmi hingga kapan para pengungsi akan menempati Rumah susun Puspoagro, Sidoarjo. Jika dibandingkan GOR Kabupaten Sampang, rumah susun Puspa Agro lebih layak dihuni. Selain menyediakan tempat tinggal yang lebih layak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjamin kebutuhan pengungsi internal Syiah Sampang, seperti makan, minum, pakaian, hingga membebaskan mereka dari segala macam biaya, baik air, listrik, maupun sewa kamar. Setibanya di Sidoarjo, para pengungsi internal juga mendapatkan perawatan kesehatan. Dalam menjalankan perannya memberikan kebutuhan mendesak terhadap pengungsi internal Syiah Sampang, pemerintah bekerjasama dengan organisasi nonpemerintah seperti MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) dan Yakkum Emergency Unit. Keduanya merupakan organisasi non-profit yang diberi izin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetap di rumah

susun Puspa Agro guna membantu memberi pendampingan secara intensif kepada pengungsi internal Syiah Sampang.¹²⁹

Pemerintah Pusat juga membentuk Tim Rekonsiliasi yang diketuai oleh Profesor Abdul A'la Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Tim Rekonsiliasi ini merupakan tim independen dan dipandang memahami agama dan mengerti permasalahan antara Sunni-dan Syi'ah yang beranggotakan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forpimda, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan Media Massa. Agenda pertama yang disusun oleh Tim Rekonsiliasi adalah mempertemukan warga Syi'ah yang kini berada di Rusunawa Jemundo Sidoarjo dengan warga kedua desa terdampak konflik. Sudah tiga tahun (2013-2015) pemerintah pusat dan pemerintah provinsi membentuk tim rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian konflik dan kekerasan, lebih dari tiga kali pertemuan rekonsiliasi serta usaha memulangkan kelompok Syi'ah. Dalam kurun waktu antara tahun 2012-2013 tim rekonsiliasi dapat memulangkan 14 kepala keluarga untuk kembali ke kampung halaman mereka di Desa Karanggayam dan Desa Bluuran dan kembali kepada ajaran Sunni. Selebihnya kelompok Syi'ah dipindahkan dari Karanggayam ke gedung olahraga kemudian direlokasi ke luar Madura, yaitu di Rumah Susun Puspo Agro, Jemundo, Sidoarjo.

Selanjutnya pada 4 Desember 2013 Presiden SBY dan Menteri Agama mengunjungi Desa Karanggayam dan Bluru'an Sampang, Madura, mengadakan pertemuan bersifat tertutup bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan pimpinan daerah Sampang. Pertemuan menghasilkan tiga poin, *pertama* presiden (SBY) menganjurkan untuk tidak kembali terjadi peristiwa konflik bernuansa SARA. *Kedua*, Presiden menyerahkan penyelesaian ke pemerintah daerah (Pemda Sampang) karena Pemda Sampang lebih mengetahui karakter sosial masyarakat Karanggayam. *Ketiga*, diharapkan konflik dapat diselesaikan, sebelum masa jabatan

¹²⁹ Nadia farabi, "Hambatan Pemulangan Pengungsi Internal Syi'ah Sampang dan Ahmadiyah Lombok", Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2014

sebagai Presiden berakhir. Terakhir upaya rekonsiliasi pemerintah terjadi tahun 2013 ketika Menteri Agama pengganti Suryadharma Ali yakni Lukman Hakim Syaifuddin mendatangi elit lokal (Kiai) yang terlibat langsung konflik untuk melakukan negosiasi, memformulasikan kebijakan-kebijakan baru terkait pemulangan kelompok Syi'ah.¹³⁰

Pada 5 Agustus 2014 Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengunjungi beberapa lokasi diantaranya lokasi konflik, Pemerintah Kabupaten Sampang, Ulama Madura, dan para pengungsi Syi'ah di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo. Kunjungan Menteri Agama tersebut merupakan amanat dari Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka dengar pendapat kepada beberapa pihak untuk mencari solusi konflik Sunni-Syi'ah di Kabupaten Sampang, Madura. Dalam kunjungannya Menteri Agama mengunjungi K.H. Ali Karrar Shinhaji yang mengetahui akar persoalan kasus Sampang, dalam pertemuan tersebut Kiai Karrar berharap agar para pengungsi bertaubat dengan sepuluh syarat. Dari Kiai Karrar Menteri Agama menuju lokasi konflik dan bertemu dengan tim rekonsiliasi yang tergabung dalam tim lima, kepada Menag tim lima menyampaikan : bahwa saat ini (2014) kondisi di Desa Karanggayam sudah kondusif, masyarakat meminta Menteri Agama melakukan pembinaan agar para pengikut Syi'ah untuk bertaubat dan dapat diterima kembali ke kampung halamannya. Selanjutnya Menag mengunjungi Kiai Shafiyuddin, Pengasuh Pesantren Darul Ulum, Sampang, dalam pertemuan itu Kiai Shafiyuddin menyampaikan kepada Menag bahwa persoalan Sunni dan Syi'ah seperti air dan minyak, sulit disatukan jalan satu-satunya adalah pertaubatan dan kembali kepada ajaran *ahlus sunnah wal jamaah*. Kunjungan terakhir Menag adalah meninjau pengungsi Syi'ah yang berada di Rusunawa Puspoagro, para pengungsi menyampaikan keinginannya agar Kementerian Agama dapat memulangkan mereka ke kampung halaman mereka di Sampang tanpa

¹³⁰ Febrihada Gahas CM, "Memahami Dinamika Konflik Syi'ah Sampang dan Kegagalan Upaya Rekonsiliasi ", Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2015

syarat, hal tersebut diungkapkan oleh Zaini, salah satu pengungsi. Dalam kesempatan itu LSM KontraS yang mendampingi para pengungsi mengusulkan supaya Kemenag menginisiasi dialog akar rumput. Karena menurutnya pada tahun 2013 pernah dilakukan proses *ishlah* namun pemerintah membatalkan *ishlah* tersebut karena kalangan ulama tidak dilibatkan dalam proses *ishlah* tersebut.¹³¹



Sumber : Kemenag Provinsi Jawa Timur

Gambar 4.2 Kunjungan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dalam rangka dengar pendapat kepada tokoh agama, tokoh masyarakat Sampang dan pengungsi konflik Syi'ah di Sidoarjo

Pada Bulan Mei tahun 2017 Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dan Binda Jawa Timur melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sampang beserta ulama di Kabupaten Sampang yang pada intinya Pemerintah membentuk tim lima yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah konflik (Desa Karanggayam dan Desa

¹³¹ Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur, Berita Acara Kunjungan Kunjungan Menteri Agama Ri Dalam Rangka Mencari Solusi Konflik Di Sampang Madura, pada 5 Agustus 2014

Bluuran) yang dibentuk guna menjembatani informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah di dua desa. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim lima tersebut sepakat bahwa para pengungsi pengikut Tajul Muluk bisa kembali ke Desa atau ke Kampung dengan syarat dan proses yaitu kembali ke ajaran semula dan harus dipondokkan ke Ponpes yang ada di wilayah Kabupaten Sampang. Pemerintah juga akan menyampaikan keinginan warga yang diwakili oleh tim lima ini kepada pengikut Tajul Muluk di Rusunawa Puspoagro Sidoarjo dan pemerintah juga berjanji akan menjembatani pemulangan pengungsi secara bertahap setelah melewati proses yang diinginkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.¹³²



¹³² Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Laporan Hasil Koordinasi dengan Para Ulama / Kyai Sampang dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Kelompok Tajul Muluk dengan Masy. Sampang, 2017.



Sumber : Kesbangpol Provinsi Jawa Timur

Gambar 4.3 Koordinasi Binda Provinsi dan Pemkab Sampang dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Karanggayam dan Desa Blu'uran

Saat ini berdasarkan data dari Biro Kessos Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, ada 335 jiwa / 81 kepala keluarga pengungsi Syi'ah yang ditampung di Rusunawa Puspoagro, Jemundo, Sidoarjo. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah pengungsi Syi'ah di Rusunawa Jemundo

Jumlah Pengungsi Syi'ah Sampang di Rusunawa Puspoagro, Sidoarjo Tahun 2017-2018

Rentang Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
> 50 Tahun	15	12	27
26-50 Tahun	52	57	109
16-25 Tahun	47	40	87
11-15 Tahun	23	33	56
6-10 Tahun	17	9	26
< 5 tahun	21	9	30
Jumlah	175	160	335

Sumber : Biro Kessos Setda Provinsi Jawa Timur

Setelah lima tahun berada di Rusunawa Puspoagro (2013-2018) saat ini para pengungsi Pemerintah Jawa Timur memberikan tunjangan jatah hidup (jadup) sebesar Rp 709.000,- per jiwa tiap bulan dari tahun 2014 hingga tahun 2017, hingga saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan dana sebesar Rp 13.638.857.500,-. Dan pada tahun 2018 dianggarkan melalui Biro Kessos Setda Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.841.672.000,-¹³³ Selain memberikan bantuan jatah hidup tiap bulan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan pelatihan kerja dan keterampilan dan memfasilitasi pengungsi Syi'ah untuk membuka usaha seperti penjual sate, pangkas rambut, penjual sayur di pasar Puspoagro, pengumpul barang bekas dan sebagian direkrut oleh PT. KARA Sidoarjo sebagai buruh pengupas kelapa, penjemur kelapa, dan buruh bongkar muat. Namun hal ini menjadi kecemburuan bagi masyarakat anti Syi'ah di daerah Sampang, sebagaimana yang diutarakan oleh Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur :

Dengan adanya bantuan macam, macam dan fasilitas-fasilitas dari pemerintah, masyarakat di Sampang semakin antipati terhadap keberadaan pengungsi Syi'ah karena mereka menganggap pengungsi Syi'ah di Sidoarjo hidupnya malah lebih berkecukupan di banding dengan mereka yang masih tinggal di Sampang.¹³⁴

Untuk pelayanan pendidikan dari tingkat dasar dan menengah bagi para anak-anak pengikut Tajul Muluk yang berada di Rusunawa Puspoagro telah tertangani dengan baik oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo dan bagi yang akan meneruskan pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi seperti di IAIN Surabaya dan PTN lain, mendapatkan bantuan pendidikan dari Biro Kessos Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, para pengungsi pengikut

¹³³ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Laporan Hasil Kegiatan Rakor Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Eddy Supriyanto, Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur pada 18 September 2018

Tajul Muluk mendapatkan Kartu Sehat dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Namun hal yang berbeda ditemukan oleh peneliti dilapangan, meskipun pemerintah Provinsi Jawa Timur membebaskan para pengungsi Syi'ah di Rusunawa Puspoagro, Taman, Sidoarjo dari berbagai biaya baik biaya air, listrik, maupun sewa kamar. Kondisi Rusunawa yang ditempati oleh para pengungsi terkesan kurang mendapat perawatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terlihat beberapa cat telah mengelupas, sistem drainase yang kurang baik, hal tersebut juga diungkapkan oleh Iklil Al-Milal : *“Selama kami lima tahun bertahan disini, fasilitas belum pernah mendapat perawatan dan rehab, beberapa waktu lalu pompa air mati, kami urunan untuk memperbaiki sendiri secara swadaya”*. Sebaiknya pemerintah Provinsi Jawa Timur mengutamakan kebutuhan dasar para pengungsi terutama masalah *papan* atau tempat tinggal.





Gambar 4.4 Kondisi Rusunawa Pengungsi Syi'ah Sampang di Puspoagro, Jemundo, Kabupaten Sidoarjo

Selain itu membebaskan berbagai biaya selama berada di Rusunawa Puspoagro, Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha meningkatkan kepercayaan pengungsi Syi'ah kepada Pemerintah Provinsi dalam penanganan konflik ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan pemenuhan pelayanan publik yang menjadi hak dasar warga negara seperti pelayanan perekaman KTP-EL, Kartu Keluarga, (sebelumnya terhambat karena ada teknis perubahan nama dan keluarga warga yang menyulitkan pihak Pemerintah Desa, kecamatan dan Dispenduk Kabupaten Sampang), Pengurusan Sertifikat Tanah (Prona), Istbat nikah, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Upaya rekonsiliasi juga perlahan mulai dilakukan oleh pemerintah provinsi, salah satu langkah untuk bertemunya / interaksi masyarakat antara masyarakat Sampang dengan kelompok Tajul Muluk, maka direncanakan akan diselenggarakan kegiatan isbat nikah. Jumlah pasangan yang mendaftarkan diri untuk melakukan isbath nikah sebanyak 360 pasangan dengan rincian 22 pasangan dari pengungsi kelompok Tajul Muluk di Jemundo dan 238 pasangan dari Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang serta 100 pasangan dari Desa Karanggayam (Daerah Konflik) dan selebihnya dari warga sekitar konflik, dengan tujuan agar tidak ada kecemburuan sosial antara pengungsi kelompok Tajul Muluk di

Jemundo dengan warga Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang dan warga Desa Karanggayam.¹³⁵

Selain memberikan hak-hak dasar warga negara kepada pengungsi Syi'ah di Rusunawa Puspoagro, Jemundo, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemprov Jawa Timur melakukan usaha-usaha menuju proses rekonsiliasi antara pengungsi Syi'ah di Jemundo dan warga di kedua desa di Karanggayam dan Blu'uran dengan berbagai cara antara lain : 1). Pelaksanaan halal-bihalal antara warga Desa Bluuran dan Desa Karanggayam, Sampang dan pengungsi Syi'ah yang dilakukan di Rusunawa Puspoagro, dihadiri 165 warga Sampang, 20 diantaranya menginap di Rusunawa Puspoagro, 2). 1 Jamaah haji dari pengungsi Syi'ah di Jemundo dilepas di Sampang, diikuti oleh 46 warga Syi'ah, 3). Beberapa pengungsi Syi'ah dari Jemundo telah kembali ke Sampang dan tidak ada penolakan, 4). Beberapa warga Syi'ah di Jemundo kembali ke kampung halaman (Bluuran dan Karanggayam) untuk menjenguk keluarga secara diam-diam, namun tidak menimbulkan gejolak warga Sunni di kedua desa.¹³⁶

Selain memberikan perhatian kepada korban konflik yang kini direlokasi sementara di Rusunawa Puspoagro, Jemundo, Sidorjo. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang juga memberikan perhatian kepada warga di dua desa terdampak konflik di Desa Karanggayam Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang dilakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka membuka wilayah agar tidak terisolir seperti :

1. Peningkatan jalan poros desa menjadi jalan makadam telah dilaksanakan oleh Kodim 0828 Sampang sepanjang 4 Km (saat ini sudah di aspal oleh program PNPM)

¹³⁵ Op.cit

¹³⁶ Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sampang, Senin 11 September 2017, Kantor Staf Kepresidenan RI.

2. Pembangunan jembatan penghubung sepanjang 24 meter dan pavingnisasi jalan sepanjang di Ds. Karang Gayam Kec. Omben (sumber dana dari APBD Sampang)
3. Program RTLH dari Kemenpera sebanyak 515 unit rumah masyarakat dan MCK Komunal diwilayah konflik dari Kemenpera
4. Jalan desa sepanjang 3700 meter dibangun Kemenpera, terdiri dari Jalan Ds. Karang Gayam 2400 meter (sudah beraspal) dan Ds. Blu'uran sepanjang 1300 meter
5. Jalan desa di Ds. Karang Gayam Kec. Omben yang di bangun melalui PNPM Mandiri.
6. Pembangunan Rusun Ponpes di sekitaran wilayah konflik.¹³⁷

Namun yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, keberadaan kelompok Syi'ah pengikut Tajul Muluk ini semakin lama semakin memperkuat keberadaan dan identitas kelompok mereka, karena mereka berada bersama-sama dalam satu lingkungan dan dapat dengan bebas melakukan aksi atau kegiatan mereka seperti menjelang Idul Adha, Idul Fitri, dan Bulan Muharram dengan dukungan oleh LSM dan Ormas serta semakin kuat dengan bantuan finansial dari pemerintah (bantuan jatah hidup dan bantuan pelatihan ekonomi). Hal ini perlu mendapat perhatian, karena dengan menguatnya identitas dan kekuatan kelompok Syi'ah serta pengaruh Ormas, program rekonsiliasi yang diusahakan oleh pemerintah akan berujung sia-sia. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki alternatif pemecahan masalah dengan pendataan kelompok pengungsi, hasil pendataan yang dilakukan ditemukan bahwa ada tiga faksi dalam kelompok pengungsi Syiah di Rusunawa Jemundo, Sidoarjo tiga faksi itu antara lain : Kelompok Tajul Muluk atau pro Tajul Muluk, Kelompok Zaini yang kontra terhadap

¹³⁷ Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. 2018. "Paparasi Penyelesaian Konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura"

kelompok Tajul Muluk dan kelompok ketiga adalah kelompok yang akan mengikuti mana yang lebih realistis.¹³⁸

Saat ini ada 335 jiwa atau 81 Kepala Keluarga pengungsi Syi'ah di Rusunawa Jemundo. Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, didapatkan 9 Kepala Keluarga merupakan kelompok Pro Tajul, 15 kepala Keluarga merupakan kelompok kontra Tajul / Kelompok Zaini, dan sisanya sebanyak 57 kepala keluarga merupakan kelompok netral karena rata-rata terdiri dari orang tua dan adanya rassa takut dengan kedua kelompok, kelompok ini cenderung mengikuti apa yang menjadi keputusan terbanyak. Kelompok pro Tajul adalah kelompok yang menginginkan kembali ke Sampang tanpa syarat dan tetap diakui sebagai penganut Syi'ah, sedangkan kelompok Zaini merupakan kelompok yang siap dipindahkan (direlokasi) dan siap kembali ke ajaran semula dengan syarat pemerintah menyiapkan tempat tinggal dan jaminan keamanan serta jaminan ekonomi (lapangan pekerjaan) di tempat yang baru.

Melalui pemetaan ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur selanjutnya membuat perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, terkait rekonsiliasi dan proses pemulangan pengungsi Syi'ah ke Sampang Madura. Rencana jangka pendek pemerintah Provinsi adalah Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur terkait pembatasan bantuan keuangan, artinya para pengungsi hanya diberikan jatah hidup (makan), namun biaya rusun dibebankan kepada Pemkab Sampang. Sedangkan rencana jangka menengah untuk pengungsi kelompok Tajul pemerintah Provinsi berencana akan memindahkan mereka keluar pulau Jawa dan Madura melalui program transmigrasi, sedangkan bagi kelompok Zaini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Perumahan Rakyat RI berencana membangun Rumah Layak Huni Sederhana di

¹³⁸ Wawancara dengan berbagai Narasumber diantaranya Kabid Kewaspadaan Kesbangpol Jatim, Kabid Hukum Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan Kakesbangpol Sampang

tiga kawasan diantaranya Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo dan selanjutnya aktivitas kelompok ini akan dipantau oleh jajaran intelijen daerah dan pembinaan keagamaan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Namun rencana untuk mentransmigrasikan pengungsi Syi'ah ditolak oleh para pengungsi karena mereka menganggap transmigrasi adalah cara untuk menjauhkan mereka dari kampung halaman mereka. Pembangunan rumah layak huni pun terancam tertunda, karena Pemerintah Jawa Timur masih melakukan upaya pembebasan tanah. Selanjutnya melalui meyakinkan kepada kelompok netral untuk turut bergabung dengan kelompok Zaini yang pada akhirnya kelompok ini akan dikembalikan ke kampung halaman mereka di Sampang jika pembinaan keagamaan dirasa cukup dan mengembalikan mereka kepada ajaran *ahlus-sunnah wal jamaah*. Rencana jangka panjang adalah reformasi ketokohan Tajul agar kelompok Tajul lebih *luwes* terhadap program rekonsiliasi Pemerintah, karena selama ini Tajul Muluk adalah tokoh yang paling keras menolak segala rencana Pemerintah dan tetap pada pendiriannya, yaitu kembali ke Sampang tanpa syarat.¹³⁹

Alternatif penyelesaian konflik yang lain adalah membiarkan konflik ini selesai secara alami, artinya biarkan konflik ini selesai dengan berjalannya waktu, namun tetap ada usaha dari pemerintah melalui proses yang tidak singkat. Salah satu cara adalah melakukan pertemuan rutin antara pengungsi Syi'ah dan Sunni dalam momen Halal Bihalal Idul Fitri. Dalam momen ini warga Desa Karanggayam dan Desa Bluuran berkunjung untuk menjenguk keluarga mereka di Pengungsian Rusunawa Puspoagro, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah mereka yang berkunjung pun tidaklah sedikit, hal ini menjadi indikator bahwa sebenarnya rekonsiliasi di akar rumput sudah terjadi. Demikian pula sebaliknya, sebenarnya beberapa pengungsi Syi'ah di Puspoagro sering kembali ke kampung halaman mereka selama beberapa hari untuk sekedar bersilaturahmi

¹³⁹ Wawancara kepada Bapak Pratomo Staf Biro Kessos Setda Provinsi Jawa Timur

kepada keluarganya di Sampang atau menengok sawah ladangnya, dan warga Desa Karanggayam maupun Blu'uran perlahan mulai menerima mereka. Maka usaha pemerintah selanjutnya adalah bagaimana menciptakan rekonsiliasi ditingkat elit, khususnya tokoh elit agama atau ulama.¹⁴⁰

Disamping upaya-upaya melakukan relokasi dan rekonsiliasi bagi pengungsi Syi'ah di Rusunawa Jemundo dan melakukan pemerataan pembangunan di dua desa terdampak konflik di Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga meningkatkan soliditas dalam penyelesaian konflik Sampang bersama Pemerintah Kabupaten Sampang, dan Pemerintah Pusat diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian tata Ruang dan Agraria, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mahkamah Agung beserta lembaga lainnya seperti Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan, dan Komisi Kepolisian Nasional.¹⁴¹

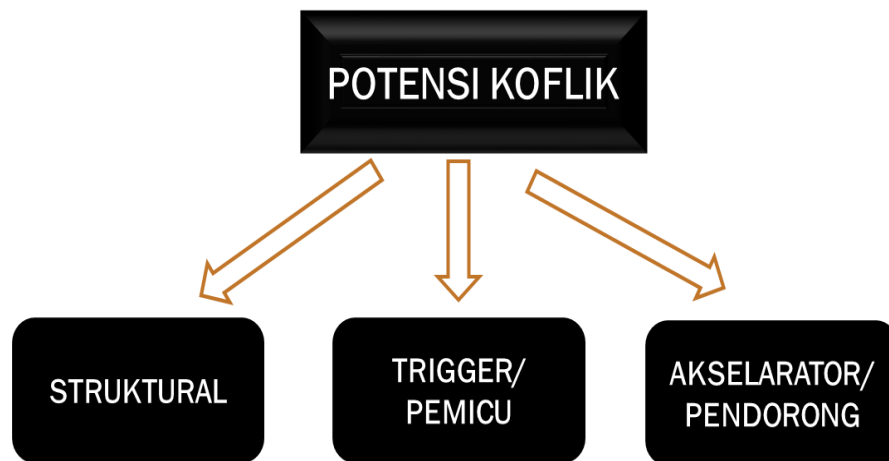
4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Konflik Menggunakan Model SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*)

Dalam analisis faktor konflik model SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*) didasarkan pada indikator-indikator spesifik penyebab konflik yaitu faktor struktural, akselerator, dan trigger atau pemicu. Dengan menggunakan model analisis SAT masalah-masalah dasar yang membuat konflik menjadi semakin besar. Dengan model SAT diharapkan dapat meminimalisir *trigger*, mereduksi akselerator, dan dapat menyelesaikan faktor struktural.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Brigadir Polisi Eko Anggota Intelkam Polres Sampang dan LO Pengungsi Syiah di Rusun Puspoargo, Polres Sampang, 22 Oktober 2018

¹⁴¹ Wawancara dengan Munajat Ph.D, Staf Kedeputian V, Kantor Staf Kepresidenan Polres Sampang, 26 Desember 2018.



Gambar 4.5 Model Analisis SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*)

Bila melihat dari kronologis peristiwa konflik antara penganut Sunni dan Syi'ah yang terjadi di Kabupaten Sampang Madura, yang selanjutnya dianalisis melalui model analisis SAT, maka faktor struktural yang menjadi masalah paling mendasar dalam konflik Sunni-Syiah di Sampang yang berupa: budaya masyarakat Madura yang kental akan tradisi keagamaan dan cenderung fanatik. Masyarakat Madura yang mayoritas beragama Islam *ahlussunnah wal jama'ah* (sunni) dan sebagian besar merupakan warga *nahdliyyin* (pengikut NU) yang kental dengan tradisi-tradisi keagamaan dengan kiai sebagai tokoh sentral dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Madura. Dengan munculnya ajaran Syi'ah yang awalnya disebar oleh Kiai Makmun (ayahanda Tajul Muluk) secara sembunyi dan terbatas, namun saat ajaran Syi'ah disampaikan oleh Tajul Muluk, dia menggunakan metode terbuka dan cenderung merubah tradisi keagamaan yang umumnya diyakini oleh masyarakat Madura diiringi dengan bertambahnya pengikut Syiah dari dua desa di Kecamatan Omben. Akibatnya terjadilah perebutan pengaruh keagamaan antara Tajul Muluk dan para pemuka agama di Kabupaten Sampang yang dipimpin oleh Kiai Ali Karrar Shinhaji yang sebenarnya masih merupakan saudara Tajul Muluk sendiri. Perebutan pengaruh antara Tajul Muluk dan para kiai sunni di Sampang selanjutnya menjalar pada masalah ekonomi, sebab

bagi masyarakat Madura sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan *bisjarah* (tanda terima kasih) kepada kiai setelah memimpin doa, selamatan, mauludan, dan urusan lainnya. Tajul melihat ini sebagai suatu hal yang membebani masyarakat, apalagi masyarakat di desanya rata-rata berada dibawah garis kemiskinan. Tajul meyebut mengkritik kiai sebagai orang yang tidak mau mengerti keadaan masyarakat dan menghimpun jamaahnya untuk melakukan tradisi keagamaan mauludan, tahlilan) secara bersama-sama, tentunya hal ini memutus salah satu sumber penghasilan para pemuka agama yang mereka dapatkan dari - *bisjarah* para jamaahnya.

Sedangkan yang menjadi akselerator dalam konflik ini adalah dalam momen Pemilukada pada 2012 salah satu kandidat calon kepala daerah menggunakan kasus Syi'ah untuk menarik simpati massa. Adanya dukungan para ulama Sampang yang tergabung dalam Bassra (Badan Silaturahmi Ulama Madura) untuk melawan ajaran Syi'ah yang dibawa oleh Tajul. Faktor akselerator lainnya yaitu terbitnya fatwa MUI Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah, yang seakan menjadi legitimasi untuk melawan ajaran Syi'ah, padahal dalam fatwa tersebut MUI Jawa Timur menghimbau untuk tidak berbuat anarkis dan tidak mudah terpancing provokasi.¹⁴²

Faktor *trigger* atau pemicu terjadinya konflik Sunni dan Syi'ah di Sampang antara lain ucapan Tajul Muluk dalam salah satu dakwahnya yang dianggap menistakan ulama Madura terkait praktik memberikan "salam tempel" dikalangan masyarakat Madura kepada kiai yang dianggap memberatkan masyarakat. Selain itu konflik internal keluarga antara Tajul Muluk dan adiknya Roisul Hukama, sehingga Roisul Hukama keluar dari komunitas Syi'ah dan berbalik melawan Tajul dengan memprovokasi masyarakat tentang kesesatan yang dilakukan oleh Tajul Muluk. Faktor

¹⁴² Lihat Lampiran Fatwa MUI Jatim No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah

pemicu lainnya adalah kekesalan kelompok Sunni terhadap Tajul Muluk yang dianggap melakukan pelanggaran kesepakatan untuk tidak kembali melakukan kegiatan dakwah ajaran Syi'ah di Desa Karanggayam dan Desa Bluuran.

Tabel 4.5 Hasil Analisis SAT Konflik Sunni dan Syi'ah di Sampang Madura

Analisis SAT Konflik Sunni-Syiah Sampang - Madura	
Faktor Struktural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya masyarakat Madura yang kental akan tradisi keagamaan yang fanatik. 2. Dakwah Syi'ah oleh Tajul Muluk secara terbuka dan merubah tradisi keagamaan yang telah berkembang di masyarakat Madura. 3. Perebutan pengaruh keagamaan antara Tajul Muluk dan Kiai-Kiai Madura. 4. Isu Ekonomi
Faktor Akselerator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu politik dalam Pemilu 2012, salah satu pasangan calon menggunakan isu ajaran Syi'ah untuk menarik simpati massa. 2. Dukungan ulama Madura. 3. Fatwa sesat MUI tahun 2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah.
Faktor Pemicu (<i>Trigger</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penistaan terhadap ulama dalam salah satu dakwahnya. 2. Konflik internal keluarga antara Tajul Muluk dan adiknya Roisul Hukama. 3. Provokasi oleh Roisul Hukama tentang kesesatan ajaran Syiah yang

	<p>dibawakan Tajul Muluk.</p> <p>4. Kekesalan kelompok sunni kepada Tajul Muluk yang dianggap melanggar kesepakatan untuk menghentikan kegiatan kagamaan.</p>
--	---

4.2.2 Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura

Menurut Ichsan Malik, bahwa ada lima sumber konflik di Indonesia, yaitu : konflik struktural, konflik kepentingan, konflik nilai, konflik hubungan sosial psikologis, dan konflik data. Dalam kasus konflik yang terjadi antara penganut Sunni dan Syi'ah di Sampang Madura, penulis berpendapat bahwa konflik ini merupakan konflik kepentingan, konflik nilai, dan konflik hubungan sosial psikologis. Disebut konflik kepentingan karena ada pihak yang harus menjadi korban untuk memuaskan kepentingan salah satu pihak. Dalam hal ini minoritas Syi'ah di dua Desa yaitu Karanggayam dan Bluuran, Kecamatan Omben, Sampang yang kurang lebih berjumlah 300 jiwa harus menjadi korban karena perbedaan keyakinan dan ritual ibadah dari mayoritas Sunni di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang terlebih lagi adanya keterlibatan oknum pasangan calon dalam Pilkada menggunakan isu Syi'ah sebagai komoditi kampanye untuk meraup dukungan mayoritas ulama Madura.

Kedua, konflik nilai, yang sering disebabkan karena sitem kepercayaan yang tidak bersesuaian. Disebut sebagai konflik nilai karena aliran Syi'ah beserta ritualnya yang diajarkan oleh Tajul Muluk dianggap tidak bersesuaian dengan nilai-nilai adat istiadat yang selama ini dianut oleh mayoritas Sunni di Sampang, Madura. Yang ketiga, konflik hubungan sosial psikologis, yang disebabkan karena adanya bias persepsi (*stereotype*) hingga menimbulkan prasangka yang berujung pada diskriminasi dan berakhir dengan kekerasan. Dalam kasus konflik

Sampang pengikut Syi'ah mendapat stereotipe sebagai aliran sesat yang tidak boleh di tumbuh di Sampang yang kental dengan tradisi-tradisi *ahlus-sunnah wal jamaah* karena dikhawatirkan akan merusak tradisi-tradisi keagamaan yang telah lama dianut oleh mayoritas Sunni.

Selanjutnya apabila melihat kronologis konflik dan analisis konflik menggunakan model SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*) antara Sunni dan Syiah di Sampang Madura, penulis menyimpulkan ada enam faktor yang menyebabkan konflik tersebut terjadi yaitu : (1) Faktor ekonomi; (2) Konflik internal keluarga; (3) penistaan agama; (4) Perebutan pengaruh keagamaan; (5) Politik; (6) Faktor Budaya. Selain keenam faktor yang menyebabkan konflik Sunni-Syi'ah di Kabupaten Sampang Madura, ada faktor klaim kebenaran (*truth claim*) antara kedua belah pihak yang bertikai (Sunni-Syi'ah) mengingat isu agama adalah isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia. Apalagi bagi masyarakat Madura, agama merupakan suatu hal yang harus dibela bahkan bila harus mempertaruhkan nyawa.

Dalam kasus konflik Sunni dan Syi'ah, kedua belah pihak menyatakan bahwa ajaran masing-masing adalah yang paling benar. Kelompok *Ahlus-sunnah wal jamaah* tidak akan menerima kembali pengungsi Syi'ah sebelum melakukan taubat dan kembali bersyahadat dan kembali kepada ajaran *ahlussunnah wal jamaah*. Kelompok Syi'ah pun tetap menghendaki kembali ke kampung halaman mereka di Desa Karanggayam tanpa ada syarat apapun karena menurut mereka tidak ada yang salah dengan ajaran yang mereka anut, karena dalam keyakinan penganut Syi'ah, ajaran yang mereka anut juga merupakan salah satu madzhab dalam Islam. Disinilah klaim kebenaran (*truth claim*) memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pemersatu dan fungsi pemecah. Klaim kebenaran menjadi faktor pemersatu bagi komunitas agama tertentu dan berfungsi sebagai faktor pemecah bagi kelompok agama yang berbeda. Klaim kebenaran inilah yang dianggap oleh Pemerintah Provinsi sebagai

fasilatator perdamaian sebagai kendala terbesar dalam melakukan proses rekonsiliasi.

Bukan tanpa alasan kedua belah pihak tetap pada pendirian mereka masing-masing. Temuan dilapangan Kelompok Sunni di Sampang enggan menerima kembali kelompok Syi'ah ke kampung halaman dengan sayarat para pengikut Tajul Muluk kembali kepada ajaran ahlu-sunnah wal jamaah bukan semata-mata karena mempertahankan keyakinan, namun lebih kepada masalah "gengsi" karena Tajul Muluk terlanjur menyakiti perasaan ulama-ulama Madura dalam salah satu dakwahnya. Kelompok pengungsi Syi'ah tetap bersikukuh ingin kembali ke kampung halaman merak di Sampang tanpa ada syarat apaun karena bagi kelompok Syi'ah berkeyakinan akidah (keyakinan) Syi'ah bukan seperti baju yang dapat diganti setiap saat, akidah adalah keyakinan yang tetap dipegang hingga akhir hayat. Kelompok Syi'ah memberikan syarat untuk melakukan *mubalahah* (sumpah pocong) untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, namun kelompok Sunni enggan menerima tawaran Tajul tersebut. Dalam situasi ini, seperti yang diungkapkan oleh Panggabean, bahwa konflik merupakan situasi dimana masing-masing pihak memiliki tujuan-tujuan yang bertentangan, dan konflik tidak selalu berupa kekerasan fisik, namun terkadang perilaku konflik juga bersifat nirkekerasan. Perilaku konflik nirkekerasan ini biasanya pertentangan dalam ide, kepentingan dan kehendak.¹⁴³

4.2.3 Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Membangun *Trust* Dalam Penyelesaian Konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura

Upaya membangun kembali perdamaian pasca konflik yang terjadi di Sampang Madura merupakan agenda besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun dalam beberapa kali Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan rekonsiliasi, sebanyak itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kegagalan. Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi

¹⁴³ Samsu Rizal Panggabean, *Konflik dan Perdamaian Antar Etnis Di Indonesia*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2018) hlm 8

Jawa Timur dalam proses rekonsiliasi antara penganut Sunni dan Syi'ah di Sampang Madura adalah menghadapi masalah ego masing-masing kelompok yang tetap bertahan dalam pendirian masing-masing.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memahami bahwa penyelesaian konflik tidak bisa diselesaikan secara rasional, namun perlu penguatan modal sosial (*social capital*) dengan membangun kepercayaan (*trust*) kepada korban maupun pelaku konflik di Sampang Madura. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Fukuyama bahwa rasa saling percaya (*trust*) tumbuh dan berakar dari nilai-nilai yang telah mengakar dan melekat dalam budaya kelompok atau masyarakat. Masyarakat Madura meyakini bahwa dalam tata kehidupan bermasyarakat terdapat tiga pilar kepatuhan hierarkis yang harus dipatuhi yaitu *bhubba' bhabhu'* (Ayah ibu-orangtua), *ghuru* (guru-ulama/kiai), dan *rato'* (pemimpin-dalam birokrasi). Namun dari ketiga pilar kepatuhan tersebut kiai memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Madura, selain sebagai tokoh agama, namun ulama juga berperan sebagai tokoh adat. Sehingga ulama merupakan ujung tombak yang sangat penting dalam membangun *trust* dikalangan akar rumput untuk tercapainya rekonsiliasi pasca konflik di Sampang.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak berhenti melakukan usaha agar terciptanya sebuah rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha membangun *trust* bagi kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Kabag Kewaspadaan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur Bapak Eddy Supriyanto "Pemerintah Jawa Timur telah melakukan pendekatan kepada ulama Sampang, jika mereka tidak mau menerima kembali pengungsi Syi'ah ke kampung halaman mereka, pengungsi Syi'ah malah akan semakin makmur, karena segala kehidupan mereka dijamin oleh Pemerintah Provinsi, namun jika mereka mau menerima kembali pengungsi Syi'ah untuk kembali tanpa syarat Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji kepada masyarakat dua desa yang terdampak konflik, akan melakukan pemerataan pembangunan

dan pembinaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga kedua desa yang secara akses memang terisolir".¹⁴⁴

Upaya membangun *trust* dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada ulama Sunni di Sampang juga dilakukan dengan mengundang seluruh ulama di Madura untuk bertemu dengan Ketua MUI Pusat, K.H Ma'ruf Amin pada bulan Agustus 2018 di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut Ketua MUI Pusat mengajak kepada seluruh ulama di Madura untuk tetap menjaga suasana kondusif di Madura. Selain itu Kia Ma'ruf Amin juga menyoroti kasus penolakan jenazah Syi'ah yang akan dimakamkan dikampung halaman mereka yang terjadi pada bulan Juni 2018. Dalam pertemuan tersebut Kiai Ma'ruf Amin menegaskan tidak perlu berbuat diluar batas, karena jenazah orang meninggal tidak mungkin akan menyebarkan paham Syi'ah.¹⁴⁵

Selain membangun *trust* dikalangan ulama Sunni di Sampang, Pemerintah Jawa Timur juga membangun kepercayaan (*trust*) kepada pengungsi Syi'ah di Jemundo, Sidoarjo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembangunan *trust* kepada pengungsi Syi'ah di Jemundo melalui pendekatan-pendekatan kultural, dan diketahui bahwa permasalahan pengungsi Syi'ah di Rusunawa adalah permasalahan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup dasar lainnya. Dengan asar tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur sgera memenuhi segala kebutuhan hidup dasar warga Syiah di Jemundo maupun warga Sampang yang ada di dua desa yang terdampak konflik. Sehingga dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengembalikan tingkat kepercayaan warga Syiah di Jemundo kepada pemerintah.

¹⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Eddy Supriyanto, M.M. Kabag Kewaspadaan Kesbangpol Jawa Timur pada 21 September 2018.

¹⁴⁵ Wawancara bersama Bapak Rudy . Kepala Kesbangpol Kabupaten Sampang pada 24 September 2018.

4.2.4 Peran Pemerintah Jawa Timur dalam Penghentian Konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Linton berpendapat bahwa peran merupakan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Mengenai peran Pemerintah Jawa Timur dalam penyelesaian konflik antara Sunni dan Syi'ah di Sampang Madura, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Ahmadi bahwa peran yaitu pengharapan manusia terhadap tata cara individu seharusnya bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu sesuai dengan status dan fungsinya, maka dalam fungsi sebagai sebuah lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dalam hubungan antar pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat beserta kewenangannya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Membahas mengenai peran pemerintah dalam konflik Sunni-Syiah yang terjadi di Sampang Madura merupakan suatu hal yang cukup menarik, karena konflik antara penganut Sunni dan penganut Syi'ah yang terjadi di sampang terjadi beberapa bulan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang mulai diundangkan pada 10 Mei 2012. Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sampang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab konflik antara penganut Sunni dan Syi'ah yang terjadi di Sampang hanya terjadi beberapa bulan pasca disahkannya undang-undang ini.

Konflik antara penganut Sunni dan Syi'ah yang terjadi di dua desa di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang pada 26 Agustus 2012 memang bukan konflik yang pertama kali terjadi. Konflik yang dalam rilis Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebut dengan Peristiwa Omben II ini merupakan eskalasi tertinggi dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya yang pernah terjadi pada tahun 2007 dan tahun 2011. Pasca Peristiwa Omben II Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang langsung berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah penghentian konflik. Langkah-langkah penghentian konflik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial meliputi : a). Penghentian Kekerasan fisik, b). Penetapan status keadaan konflik, c). Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau, d). Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa: "Penghentian Kekerasan Fisik melibatkan Polri sebagai koordinator dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat".¹⁴⁶ Setelah terjadinya konflik pada tanggal 26 Agustus 2012 tindakan yang dilakukan dalam rangka penghentian kekerasan fisik, Polri langsung menurunkan 5 (lima) satuan setingkat kompi untuk melakukan pengamanan di kedua desa terdampak konflik, dan mendirikan Posko Keamanan di lokasi konflik dipimpin langsung Karoops Polda Jawa Timur. Selanjutnya polisi menetapkan 8 (delapan) tersangka dalam salah satunya adalah Roisul Hukama yang diduga aktor intelektual dibalik peristiwa Omben II ini. Polisi dengan dibantu unsur TNI melaksanakan pengamanan terhadap 5 rumah yang tidak terbakar untuk penyelamatan harta benda korban konflik selama berada di pengungsian. Polisi juga melakukan operasi razia senjata tajam dan menurunkan tim identifikasi yang terdiri

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 13 ayat (1) dan (2)

dari Tim Dokkes, Inafis, Labfor dan Gegana guna pengumpulan barang bukti. Selanjutnya pelibatan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam penghentian kekerasan fisik langsung direspon oleh Ketua MUI Jawa Timur K.H Abdusshomad Buchori dengan mengutus KH Nuruddin yang berdomisili di Bangkalan dan KH Buchori Maksum (Ketua MUI Sampang) untuk memantau situasi dan melakukan koordinasi dengan Polres Sampang, dan tokoh masyarakat setempat kemudian melaporkan perkembangan yang terjadi kepada ketua MUI Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2012 MUI Jawa Timur, PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur, PC Nahdlatul Ulama Sampang dan MUI Sampang dan beberapa aktivis yang menjadi saksi mata dalam konflik melakukan dengar pendapat dengan warga dua desa yang terdampak konflik. Himbauan dari Gubernur Jawa Timur ketika meninjau lokasi konflik pada keesokan harinya tanggal 27 September 2012, mengajak kepada para ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap tenang dan jangan terpancing provokasi, sekaligus memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak kriminal akan mendapat hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁷

Kemudian dalam Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa : “Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan”.¹⁴⁸ Dalam peristiwa konflik yang terjadi antara penganut Sunni dan Syi’ah di dua desa masing masing di Kecamatan Omben dan satu desa di Kecamatan Karangpenang pada 26 Agustus 2012 dapat diredam dan dikendalikan oleh Polri dengan mengerahkan kekuatan 5 (lima) satuan setingkat kompi dari Polres Sampang, Polres Pamekasan, Sat Brimob Pamekasan, dan Polda Jawa Timur. Sehingga

¹⁴⁷ Rilis Kronologis Konflik Sunni-Syiah di Sampang Tanggal 26 Agustus 2012 oleh MUI Jawa Timur, Agustus 2012

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 14

konflik yang terjadi tidak sampai mengganggu fungsi pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak perlu menetapkan Status Rawan Konflik.

Selanjutnya dalam hal tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ada sembilan langkah tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban yang meliputi :

- a. Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban secara cepat dan tepat. Pasca kejadian konflik pada 26 Agustus 2012 dilakukan evakuasi dengan segera kepada korban kerusuhan dari Desa Karanggayam dan Bluuran ke GOR Indoor Sampang, jumlah pengungsi yang tercatat kala itu 269 jiwa yang terdiri dari 66 laki-laki, 71 orang perempuan, 96 anak-anak dan 36 balita. Dalam hal identifikasi korban, Polri menurunkan Labfor, Inafis dan Dokkes untuk melakukan identifikasi, dan hasil identifikasi tersebut didapatkan korban meninggal satu orang dan sepuluh orang terluka baik dari kedua belah pihak yang bertikai dan dari kepolisian. Seluruh korban langsung dilarikan Ke RSUD Sampang. Dari hasil identifikasi tersebut juga diperoleh kerugian material berupa 39 rumah/KK terbakar.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik. Pasca dipindahkannya para pengungsi dari dua Desa di Kecamatan Omben dan Karangpenang ke tempat pengungsian sementara di GOR indoor Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa timur melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur segera menerjunkan satuan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) untuk membantu menangani pengungsi dan mendirikan dapur umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan bantuan berupa sarung, selimut, makanan instan, air minum, pakaian dewasa, pakaian

anak, perlengkapan bayi, perlengkapan mandi, perlengkapan makan, tikar dan terpal. Pemerintah Provinsi juga telah menyiapkan dana sebesar 700 juta rupiah untuk penanganan pengungsi.

- c. Pemenuhan kebutuhan pengungsi termasuk kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana di GOR Indoor Sampang seperti tempat ibadah, sekolah darurat, dan sarana MCK.
- d. Perlindungan terhadap kelompok rentan. Dilakukan oleh Polda Jawa Timur dan Polres Sampang dengan menempatkan personel mereka di GOR indoor Sampang untuk menghindari tindakan persekusi maupun aksi provokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sedangkan pemerintah Kabupaten Sampang menetapkan semua warga yang ada di dua desa terdampak konflik sebagai korban yang wajib dilindungi jiwa dan materinya.
- e. Upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik. Kepolisian melalui Polda Jawa Timur mendirikan Posko Keamanan di lokasi konflik dipimpin langsung Karoops Polda Jawa Timur, pengamanan dilokasi kejadian dilakukan oleh Sat Brimob Pamekasan. Polisi juga melakukan razia senjata tajam dan membatasi keluar masuk warga di dua desa terdampak konflik. Polisi juga melakukan pengamanan terbuka dan tertutup hingga kondisi dinyatakan benar-benar kondusif.
- f. Penyelamatan sarana dan prasarana vital. Dalam konflik yang terjadi di Desa Bluuran dan Desa Karanggayam tidak sampai merusak sarana dan prasarana vital seperti kantor desa, maupun sarana kesehatan dan sarana pendidikan di kedua

desa. Kerusakan sarana menimpa sarana ibadah milik pengikut Syi'ah.

- g. Penegakan hukum. Pasca kejadian konflik antara pengikut Sunni dan Syiah di Sampang, polisi segera menetapkan 8 (delapan) tersangka penyerangan dan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedelapan tersangka tersebut. Vonis yang dikenakan kepada mereka cukup beragam, dari vonis 2 tahun penjara hingga 10 bulan penjara.
- h. Pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik. Pengaturan mobilitas orang pasca kejadian konflik memang masih dibatasi oleh polisi untuk tujuan sterilisasi dikedua desa terdampak konflik. Namun untuk barang dan jasa tidak berpengaruh kepada desa terdampak konflik, karena letak dua desa terdampak konflik yang terpencil.
- i. Penyelamatan harta benda milik korban. Dilakukan oleh polisi pasca kejadian konflik, polisi melakukan menyiapkan dan melakukan pengamanan terhadap lima rumah yang tidak terbakar untuk dijadikan penampungan harta benda milik pengungsi yang tidak sempat diselamatkan oleh para pengungsi sebelum evakuasi.¹⁴⁹

Selanjutnya dalam hal Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagai salah satu tindakan penghentian konflik, dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan : “ Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/walikota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah”. Terkait pengerahan bantuan TNI dalam penghentian konflik di Sampang, karena Pemerintah Kabupaten Sampang tidak melakukan Status Keadaan Konflik pada skala kabupaten, TNI yang diturunkan ke lokasi kejadian bersifat membantu

¹⁴⁹ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dokumen Rangkaian Peristiwa Omben-Sampang, 2012.

polisi dalam upaya pengamanan dua desa terdampak konflik. Jumlah TNI yang diturunkan pun hanya 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Kodim Sampang. Sehingga dalam upaya penghentian konflik sosial antara penganut Sunni-Syi'ah di Sampang, Madura Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta Pemerintah Kabupaten Sampang telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

4.2.5 Peran Pemerintah Jawa Timur dalam Pemulihan Pascakonflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Pemulihan pascakonflik menjadi bagian terpenting menuju rekonsiliasi, daerah-daerah pascakonflik umumnya masih dalam kondisi rentan dengan potensi konflik yang mudah muncul ke permukaan. Untuk memastikan agar pembangunan perdamaian di daerah pascakonflik dapat berjalan berkesinambungan, Pemerintah daerah melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Selanjutnya pada dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, upaya-upaya pemulihan pasca konflik meliputi : a). rekonsiliasi, b). rehabilitasi, c). rekonstruksi.

Upaya rekonsiliasi dalam pemulihan pascakonflik diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara : a). perundingan secara damai; b). pemberian restitusi; c). pemaafan. Dan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa rekonsiliasi dilakukan dengan melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

4.2.5.1 Rekonsiliasi Pascakonflik

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka rekonsiliasi antara para pihak yang berkonflik. Setahun setelah konflik terjadi di Sampang pada 26 Agustus 2012, Pemerintah Pusat membentuk Tim Rekonsiliasi yang diketuai oleh Profesor Abdul A'la Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Tim Rekonsiliasi ini merupakan tim independen dan dipandang memahami agama dan mengerti permasalahan antara Sunni-dan Syi'ah yang beranggotakan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forpimda, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan Media Massa. Agenda pertama yang disusun oleh Tim Rekonsiliasi adalah mempertemukan warga Syi'ah yang kini berada di Rusunawa Jemundo Sidoarjo dengan warga kedua desa terdampak konflik.

Pemerintah pusat pun memberikan perhatian terhadap konflik yang terjadi antara Sunni-dan Syi'ah di Sampang, pada tanggal 4 Desember 2013 Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono beserta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu diantaranya Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, Mendagri Gamawan Fauzi, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, dan Panglima TNI Moeldoko mengunjungi Kabupaten Sampang untuk memantau perkembangan rekonsiliasi pascakonflik antara pemeluk Sunni dan Syi'ah. Presiden SBY juga bertemu dengan ketua Tim Rekonsiliasi yang diketuai oleh Profesor

Abdul A'la, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya Presiden SBY dan Menteri Agama mengunjungi Desa Karanggayam dan Bluru'an Sampang, Madura, dan mengadakan pertemuan bersifat tertutup bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan pimpinan daerah Sampang. Pertemuan menghasilkan tiga poin, *pertama* presiden (SBY) menganjurkan untuk tidak kembali terjadi peristiwa konflik bernuansa SARA. *Kedua*, Presiden menyerahkan penyelesaian ke pemerintah daerah (Pemda Sampang) karena Pemda Sampang lebih mengetahui karakter sosial masyarakat Karanggayam. *Ketiga*, diharapkan konflik dapat diselesaikan, sebelum masa jabatan sebagai Presiden berakhir.¹⁵⁰

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi dialog antara pihak yang berkonflik dalam rangka menuju rekonsiliasi, namun dari beberapa kali pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu berujung pada kegagalan. Dalam setiap dialog guna membahas proses *ishlah* tokoh dari kedua belah pihak selalu berdebat mengenai keyakinan masing-masing (Sunni-Syi'ah) yang akhirnya inti permasalahan untuk membahas poin-poin rekonsiliasi selalu berujung pada kegagalan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada akhirnya melakukan pendekatan kepada masing-masing tokoh dari kedua belah pihak. Pertemuan demi pertemuan dan komunikasi baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang sehingga ditemukan jalan keluar terbaik dalam rangka rekonsiliasi penyelesaian konflik sosial di Sampang. Dalam sebuah pertemuan antara Mendagri, Dirjen Kesbangpol, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Gubernur Jatim, Bupati Sampang, Ka. Kesbangpol Sampang dengan Ulama (KH. Syafiuddin Abdul Wahid, KH. Ali Karrar

¹⁵⁰ Moch. Andriansyah, 2013. "Kunjungan ke Sampang, SBY temui tim rekonsiliasi Suni-Syiah", Merdeka.com, 4 Desember 2013 diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/kunjungan-ke-sampang-sby-temui-tim-rekonsiliasi-suni-syiah.html> pada 1 Januari 2018.

Shinhaji, KH. Nuruddin Abd Rahman) di Hotel Shangrila Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2013 disepakati bahwa proses rekonsiliasi pengungsi pengikut Tajul Muluk sebelum dikembalikan ke desanya, terlebih dahulu dipindah ke Asrama Haji Surabaya, di sana pengungsi dibina oleh tokoh ulama Madura yang difasilitasi oleh Kemenag Jatim. Setelah ke Asrama Haji, pengungsi dipindah ke Pondok Pesantren milik ulama Bassra di Madura sambil lalu menunggu proses pembangunan tempat tinggal/ rumah yang terbakar.

Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama di dua desa terdampak konflik dilakukan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan membentuk tim lima yang terdiri dari lima gabungan tokoh agama di Desa karanggayam, Kecamatan Omben dan lima gabungan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang. Tim ini dibentuk untuk menjembatani komunikasi aspirasi masyarakat di dua desa dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Dalam proses rekonsiliasi merupakan tahap yang terberat yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam proses rekonsiliasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut melibatkan ulama Sampang dalam penyelesaian konflik, yang didasari oleh budaya kepatuhan masyarakat Madura kepada tokoh agama / ulama, namun demikian, ulama-ulama tersebut memandang rekonsiliasi berdasarkan perspektif mereka sendiri. Sebagai ulama sunni, mereka terus menekankan bahwa mereka menjunjung toleransi asalkan tidak menyimpang dari akidah, sehingga penyelesaian konflik ini diselesaikan dengan “pelurusan akidah” mereka tidak berkeberatan kembalinya pengungsi Syi’ah ke kampung halaman mereka, namun para pengungsi yang akan kembali telah kembali ke ajaran Sunni setelah melaksanakan proses “deradikalisasi” ajaran Syi’ah yang mereka anut di pondok pesantren *ahlussunnah* di Sampang. Sedangkan pengungsi Syi’ah di Sidoarjo melalui tokoh mereka, Tajul Muluk, menghendaki rekonsiliasi dengan kembali ke kampung halaman

mereka tanpa perlu kembali ke ajaran Sunni dan tetap pada ajaran yang mereka anut. Pada tahap inilah rekonsiliasi mengalami kebuntuan dan hingga saat ini belum ada perkembangan yang berarti dalam proses rekonsiliasi konflik.

Sedangkan menurut Long dan Brecke dalam Ichsan Malik Suksesnya sebuah proses rekonsiliasi, tergantung kepada empat faktor yaitu : *novelty*, sesuatu yang baru untuk menyelesaikan konflik, *volentariness*, yaitu kerelawanan, *vulnerability* yaitu kesadaran bahwa proses rekonsiliasi sarat akan eksploitasi, *noncontingency* kesepakatan-kesepakatan yang telah terjalin harus dijaga secara konsisten. Maka dalam proses rekonsiliasi konflik Sunni-Syi'ah di Sampang setidaknya ada dua faktor yang hilang yang menyebabkan gagalnya rekonsiliasi yaitu : Pertama, ketiadaan *novelty* (kebaruan) dalam penyelesaian konflik, masing masing pihak masih bertahan dengan ego masing masing, dan perspektif masing-masing untuk mencapai sebuah rekonsiliasi. Kedua, ketiadaan *volentariness* (kerelawanan) dari masing masing pihak yang terlibat konflik. Sehingga ketiadaan dua faktor keberhasilan rekonsiliasi tersebut berdampak pada proses penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah masih mengalami kebuntuan.

4.2.5.2 Rehabilitasi Pascakonflik

Proses rehabilitasi pascakonflik adalah proses pemulihan, perbaikan, dan penguatan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban kondisi masyarakat yang terkena dampak konflik agar kembali pada kondisi aman, tenteram, damai, dan sejahtera.¹⁵¹ Pelaksanaan rehabilitasi pascakonflik diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

¹⁵¹ Pasal 38, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial diantaranya :

- a. Pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan izin kepada lembaga nonprofit dalam menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan dan pemulihan pascakonflik seperti MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) dan Yakkum Emergency Unit. Disamping itu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan melakukan pembinaan mental, spritual dan keagamaan kepada pengungsi Syi'ah.
- b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban secara seimbang baik ditempat pengungsian dan diwilayah terdampak konflik. Dilokasi pengungsian Syi'ah di rusunawa Puspoagro, melalui pelatihan usaha dan keterampilan dan pemberian modal usaha, dan menyalurkan kerja sesuai dengan tingkat pendidikannya di seputaran Pasar Induk Puspoagro. Untuk pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban di daerah terdampak konflik, Meningkatkan infrastruktur baik fisik maupun non fisik di wilayah Sampang khususnya yang berada di wilayah konflik (Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Dan Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang) dan diwilayah Kabupaten Sampang pada umumnya.
- c. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur dalam rangka perbaikan dan pengembangan lingkungan perdamaian adalah dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kondisi keamanan dan kondusivitas pasca

konflik. Memfasilitasi para pengikut Syi'ah yang akan kembali ke aliran Sunni dan dikembalikan ke kampung halamannya dengan pembinaan keagamaan di Asrama Haji Surabaya.

- d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015 telah melakukan penguatan relasi sosial yang dilakukan dengan cara Pelaksanaan Halal Bihalal di Rusun Jemundo Sidoarjo 165 an Warga Sampang hadir dan 20 diantaranya menginap di Rusunawa Jemundo, 1 Jamaah Haji dari warga di Jemundo berangkat melalui Sampang (46 warga mengantar ke Sampang sebelum pemberangkatan). Beberapa Pengungsi / warga Sampang sudah kembali. Beberapa warga Syi'ah Jemundo menengok kampung halaman secara diam-diam, namun tidak menimbulkan gejolak ditengah tengah masyarakat kedua desa terdampak konflik.
- e. Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, dalam rangka penanganan konflik sosial di wilayah Provinsi Jawa Timur menekankan kerjasama antardaerah dan antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi sehingga terjalin kerjasama yang baik dalam penanganan konflik.¹⁵² Sedangkan pada tingkat Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana program Pemerintah Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2013-2018, bahwa dalam rangka penanganan konflik sosial, Pemerintah Kabupaten Sampang meningkatkan peran serta masyarakat

¹⁵² Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019". Hlm. 353 melalui <http://jatimprov.go.id/read/rpjmd/rpjmd-2014-2019> diakses pada 2 Januari 2019

dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan.¹⁵³

- f. Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pelayanan kebutuhan administrasi dasar pemerintahan seperti pelayanan perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga bagi pengungsi Syi'ah di Jemundo, Sidoarjo. Pelayanan pembuatan SIM bagi warga Rusunawa, Sertifikasi tanah yang ditinggalkan oleh pengungsi Syi'ah. Pelaksanaan Itsbat nikah terpadu kerjasama antara Mahkamah Agung-Kemenag-Kemendagri-Pemerintah Provinsi Jawa Timur-dan Pemerintah Kabupaten Sampang Isbath nikah diikuti oleh 360 pasangan dengan rincian 238 pasang dari Desa Blu'uran Kec. Karang Penang, 100 pasang dari Desa Karang Gayam dan 22 pasang dari Rusunawa Jemundo Puspa Agro Jemundo, Dan pembuatan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera oleh Kemensos. Sesuai ketentuan KPU RI bahwa penyelenggaraan pemilihan bagi warga Sampang yang ada di Rusunawa Jemundo dilaksanakan di daerah asal (di Sampang khususnya utk Pilbub, dan diwilayah Jawa Timur untuk Pilgub), sehingga rencananya dalam pilbub pencoblosan dilaksanakan di Sampang (membawa warga Sampang di Jemundo ke Sampang). Namun, dengan pertimbangan keamanan, maka saat ini diupayakan oleh Pemprov Jatim, Pemkab Sampang, KPU Provinsi dan KPU Sampang, agar pemungutan suara tetap dilaksanakan di tempat pengungsian Sidoarjo, melalui TPS Khusus

¹⁵³ Pemerintah Kabupaten Sampang, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013–2018". Hlm 165, melalui <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=163951&lokasi=lokal> diakses pada 2 Januari 2019.

- g. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. Pemerintah Daerah melalui Biro Kessos Sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur memberikan jatah hidup kepada masing-masing pengungsi sebesar Rp 709.000,- per jiwa tiap bulan.
- h. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Sidorjo semua warga pengikut Tajul Muluk mendapatkan pelayanan kesehatan Gratis di Puskesmas setempat melalui Kartu Indonesia Sehat.
- i. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Sidorjo semua warga pengikut Tajul Muluk mendapatkan pelayanan kesehatan Gratis di Puskesmas setempat melalui Kartu Indonesia Sehat
- j. Pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik. Pemerintah Provinsi mendapat laporan dari pengungsi Syi'ah di Sidoarjo bahwa tanah dan bekas rumah mereka ditanami oleh oknum warga, pasca menerima laporan tersebut ternyata laporan tersebut tidak terbukti. Dan untuk mengantisipasi terjadinya pengambilan lahan dan eks properti warga Syi'ah di kedua desa terdampak konflik, Pemerintah Provinsi bersama Kementerian ATR/BPN melakukan sertifikasi tanah melalui Prona.

4.2.5.3 Rekonstruksi Pascakonflik

Proses rekonsiliasi pascakonflik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Dalam rangka upaya rekonstruksi pascakonflik di wilayah dua desa terdampak konflik, dilaksanakan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan melakukan pembangunan infrastruktur dengan tujuan membuka akses bagi warga dua desa terdampak konflik, karena sebelumnya kedua desa merupakan desa terpencil dan terisolir. Pembangunan infrastruktur ini diantaranya :

- a) Peningkatan jalan poros desa menjadi jalan makadam telah dilaksanakan oleh Kodim 0828 Sampang sepanjang 4 Km (saat ini sudah di aspal oleh program PNPM)
- b) Pembangunan jembatan penghubung sepanjang 24 meter dan pavingnisasi jalan sepanjang di Ds. Karang Gayam Kec. Omben (sumber dana dari APBD Sampang)

- c) Program RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) dari Kemenpera sebanyak 515 unit rumah masyarakat dan MCK Komunal diwilayah konflik dari Kemenpera.
- d) Jalan desa sepanjang 3700 meter dibangun Kemenpera, terdiri dari Jalan Ds. Karang Gayam 2400 meter (sudah beraspal) dan Ds. Blu'uran sepanjang 1300 meter
- e) Jalan desa di Ds. Karang Gayam Kec. Omben yang di bangun melalui PNPM Mandiri.
- f) Pembangunan Rusun Ponpes di sekitaran wilayah konflik.¹⁵⁴

Selain melakukan pembangunan infrastruktur di daerah terdampak konflik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana melakukan relokasi pengungsi Syi'ah dari Rusunawa Jemundo kerumah cluster layak huni type 36 melalui dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan syarat Pemerintah Provinsi memfasilitasi tanah/lahan (tanah *clean dan clear*) apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah ,menyiapkan lahan maka relokasi dilaksanakan dan pembangunan rumah khusus selesai, maka rumah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (termasuk hak kepemilikan), tetap dikelola Pemprov Jatim atau dihibahkan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apabila mendapatkan persetujuan dengan rencana relokasi tersebut, maka pihak Kemenag juga akan melakukan kegiatan pemberian bimbingan keagamaan kepada kelompok Syiah Tajul Muluq agar secara bertahap bersedia kembali ke ajaran semula dan dapat *direpatrasi* ke Sampang. Namun rencana urung dilakukan karena hingga saat ini Pemerintah Provinsi belum mendapatkan lahan yang tepat dan sesuai.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "Penyelesaian Permasalahan Antara Kelompok Tajul Muluq Di Rusunawa Jemundo Sidoarjo) Dengan Masyarakat Sampang 2018"

¹⁵⁵ Wawancara dengan Munajat Ph.D, Staf Kedeputian V, Kantor Staf Kepresidenan Polres Sampang, 26 Desember 2018

4.2.6 Peran Pranata Adat Dalam Penyelesaian Konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura

Peran lembaga pranata adat dalam menyelesaikan konflik antara penganut Sunni dan Syi'ah di Sampang Madura menjadi sangat penting, sebab ada beberapa nilai budaya lokal masyarakat Madura yang berpotensi membangun iklim damai di Madura. Selain itu peran lembaga adat termasuk dalam salah satu lembaga dan mekanisme dalam penyelesaian konflik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial :

- (1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan megedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.

Salah satu budaya lokal Madura adalah kepatuhan terhadap ulama/kiai. Masyarakat Madura dapat dikatakan sebagai masyarakat yang identik dengan Islam dan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang paling banyak berkembang di Madura. Islam pada masyarakat Madura dapat dikatakan telah mendarah daging yang berfungsi sebagai inti kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika pada masyarakat Madura, Salah satu ajaran moral dan etika dimanifestikan dalam bentuk rasa hormat dan patuh kepada kiai. Gelar kiai hanya diberikan pada orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan dianggap berjasa dalam dakwah. Mengaji merupakan hal kemampuan yang 'harus' dimiliki oleh orang Madura. Ungkapan "*Ngajhi reya bhanda akherat*" (mengaji sebagai modal akhirat) menempatkan guru ngaji/ agama dan institusi pondok pesantren menjadi tumpuan dalam mempelajari agama Islam. Kepatuhan kepada kiai bagi masyarakat Madura telah ditanamkan sejak dini ketika anak-anak Madura belajar agama di langgar, masjid dan madrasah diniyyah, sehingga kiai/ulama di Madura menjadi rujukan dalam

penyelesaian permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial di Madura.¹⁵⁶

Melihat potensi pranata adat yang ada pada pemuka agama (ulama) ini, Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk tim lima di masing-masing desa dari kedua desa terdampak konflik yaitu di Desa Bluuran dan Desa Karanggayam. Tim lima ini terdiri dari tokoh agama (ulama) dan tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara warga kedua desa terdampak konflik dengan Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keberadaan tim lima di kedua desa terdampak konflik ini sangat dirasakan manfaatnya baik oleh warga kedua desa maupun pengungsi Syi'ah di Rusunawa Jemundo. Bagi warga di dua desa terdampak konflik peran tim lima sebagai jembatan komunikasi kepada pemerintah dalam menyampaikan aspirasi warga khususnya dalam peningkatan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, dan penyediaan air bersih. Bagi pengungsi Syi'ah di Jemundo, peran tim lima sebagai penjamin keamanan bagi pengungsi Syi'ah yang akan kembali ke kampung halaman mereka di kedua desa terdampak konflik untuk sementara waktu seperti ketika masa panen, idul adha dan idul fitri, atau sekedar menjenguk keluarga mereka di Sampang. Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tim lima merupakan mitra dalam menciptakan suasana kondusif di kedua desa terdampak konflik, seperti menjaga aset (rumah/tanah) pengungsi Syi'ah yang ditinggalkan pemiliknya, komunikasi dengan aparat setempat jika ada pengungsi Syi'ah kembali untuk sementara waktu.

Namun adanya tim lima yang beranggotakan tokoh masyarakat dan tokoh agama di kedua desa terdampak konflik belum menyentuh pada tahap usaha terciptanya rekonsiliasi bagi kedua pihak yang berkonflik. Kewenangan tim lima di kedua desa terdampak konflik hanya sebatas

¹⁵⁶ Iqbal Nurul Azhar, "Memposisikan Kembali Peran Kiai dan Pesantren Dalam Membangun Pariwisata di Madura" Dalam Buku "Madura 2020: Membumikan Madura Menuju Globalisasi" (Malang, Inteligencia: 2018) hlm. 64

“perantara” komunikasi antara warga ditingkat desa dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, sedangkan aktor-aktor rekonsiliasi masih didominasi oleh elit di tingkat kabupaten, baik elit agama (ulama) maupun elit politik. Semua ulama Sunni di Sampang sepakat menetapkan bahwa aliran Syiah yang diajarkan oleh Tajul Muluk telah menistai agama Islam karena beberapa alasan seperti merendahkan harga diri para ulama dan menyatakan bahwa Al-Qur’an merupakan kitab yang tak lagi autentik. Sehingga tiada syarat lain yang disampaikan oleh para ulama, bahwa konflik ini harus diselesaikan dengan pelurusan akidah. Selain elit agama, elit politik di Kabupaten Sampang juga memiliki kepentingan yang menghambat rekonsiliasi kedua belah pihak, sudah bukan rahasia bahwa setiap Bupati di Sampang selalu didukung oleh mayoritas ulama, sehingga walaupun posisinya sebagai pejabat pemerintahan di Kabupaten Sampang, tetapi secara personal bupati tersebut harus menjaga eksistensi agar Sunni tetap harus bertahan dari ancaman ajaran Syi’ah agar tidak kehilangan dukungan dari mayoritas ulama Sampang.

4.2.7 Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Sunni-Syi’ah di Sampang Madura

Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya penghentian konflik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu : a. Penghentian konflik; b. Penetapan status keadaan konflik; c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Namun dalam upaya pemulihan pascakonflik Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kesulitan, khususnya pada proses rekonsiliasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kesulitan dalam melaksanakan proses rekonsiliasi antara penganut Sunni dan Syi’ah di Sampang Madura. Kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah

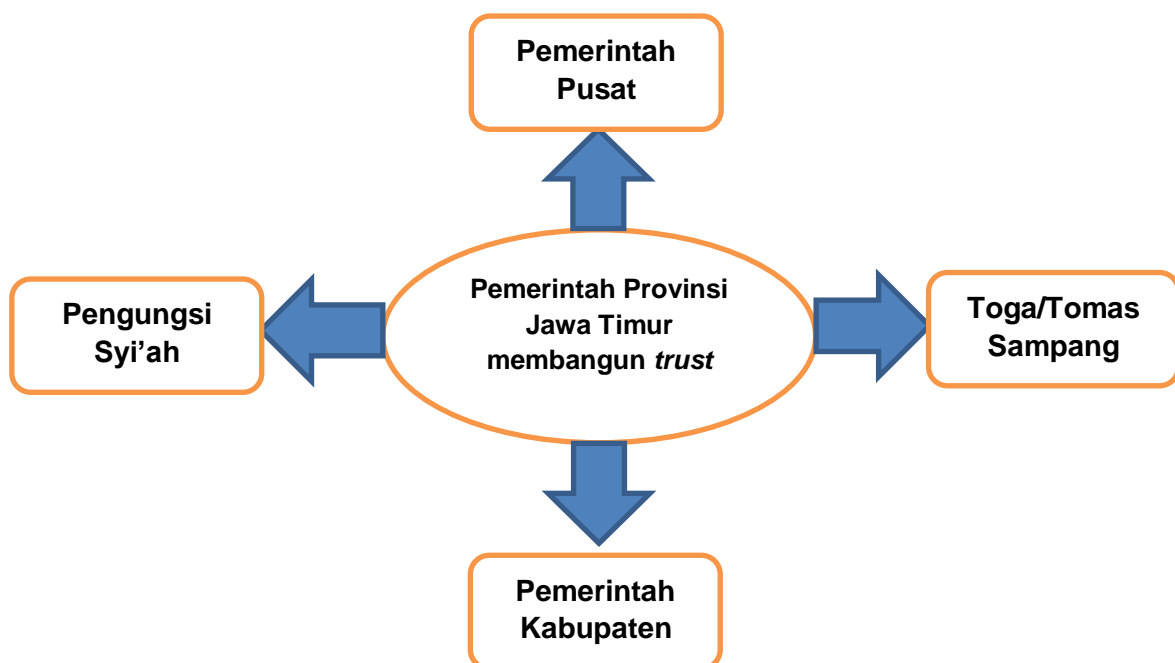
Provinsi antara lain : a. Aktor rekonsiliasi di tingkat kabupaten cenderung menjadi bagian dari masalah, bukan menjadi *problem solver* aktor konflik di tingkat kabupaten tidak berfungsi sebagaimana aktor rekonsiliasi, dengan berbagai alasan, tampak keberpihakan aktor rekonsiliasi di tingkat kabupaten untuk mendukung pihak yang lebih kuat; b. Masalah koordinasi antar lembaga pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Oleh sebab itu langkah optimalisasi perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengambil langkah-langkah tepat agar hal-hal yang menjadi penghambat rekonsiliasi dapat segera diatasi. Langkah optimalisasi yang diperlukan dapat dilakukan dengan cara melibatkan *top leader* ditingkat nasional dalam proses resolusi konflik antara penganut Sunni-Syi'ah khususnya tokoh yang dapat mendekati dan berpengaruh oleh ulama di Madura, singkat kata diperlukan sosok yang dapat memenangkan hati dan pikiran para aktor rekonsiliasi di Sampang. Hal ini sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang pada bulan Agustus 2018 dengan mengundang Ketua MUI Pusat K.H Ma'ruf Amin dalam forum silaturahmi ulama Madura di Surabaya, namun hal ini tidak cukup hanya dilakukan sekali saja, diperlukan usaha berkali-kali agar usaha tersebut berdampak pada terbukanya pemikiran para aktor rekonsiliasi di tingkat elit lokal Sampang.

Langkah optimalisasi selanjutnya adalah memperkuat koordinasi antar lembaga baik di tingkat pusat, provinsi, daerah dan masyarakat. Dalam penanganan konflik di Sampang masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik bekerja secara parsial, pemerintah bekerja dengan programnya sendiri, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemanusiaan berjalan sendiri sehingga yang terjadi adalah tumpang tindih program dan saling lempar tanggung jawab. Pada tahun 2017 koordinasi antar lembaga semakin membaik dengan masuknya Kanor Staf Kepresidenan dalam penanganan konflik sosial di Sampang Madura. Program pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak-hak

dasar pengungsi seperti perekaman KTP-EI, itsbat nikah, sertifikasi tanah, pembangunan rumah kluster bagi pengungsi dapat terlaksana karena terjalannya koordinasi yang baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta lembaga swadaya masyarakat. Program pemenuhan hak dasar bagi pengungsi Syi'ah di Jemundo, Sidoarjo tidak dapat dilakukan tanpa kerjasama dan koordinasi yang baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang dan masyarakat.

Langkah optimalisasi selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura adalah dengan membangun *trust* kepada semua pihak yang terlibat dalam proses rekonsiliasi, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, ulama Sampang, dan pengungsi Syi'ah. Pembangunan *trust* akan membuka jalan menuju penyelesaian konflik dengan memakai pendekatan kooperatif. Melalui pendekatan kooperatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat membuka pintu mediasi bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik.



Gambar 4.6 Bagan Pembangunan *Trust* Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Alternatif langkah optimalisasi selanjutnya adalah dengan menggunakan intelijen penggalangan. Pemerintah Jawa Timur dan stakeholder terkait yang memiliki fungsi intelijen seperti Polri, Korem, dan BINDA Provinsi, dapat melakukan strategi intelijen penggalangan dalam penyelesaian konflik antara Sunni-Syi'ah di Sampang Madura. Operasi penggalangan intelijen dapat dilakukan dengan melakukan : *Penyusupan Sasaran*, sasaran yang akan menjadi target disusupi oleh agen penggalangan dengan cover identity dan cover action sehingga obyek yang akan disusupi tidak sadar telah tersusupi lawan. Langkah kedua adalah *Penceraiberaian sasaran* yang bertujuan untuk membuat kerusakan struktural pada target yang disusupi. Pada tahap selanjutnya adalah tahapan *Pengingkaran* yang bertujuan agar setiap individu dalam kelompok ingkar terhadap pemimpin kelompoknya. Setelah langkah pengingkaran berhasil dilaksanakan, maka tahapan selanjutnya adalah *Pengarahan Sasaran* agar suatu kelompok yang disusupi beserta pemimpinnya menerima kenyataan yang baru setelah dilakukan langkah-langkah penggalangan oleh para agen secara terselubung. Tahap selanjutnya setelah pengarahannya adalah tahap *Penggeseran* dengan menggeser kedudukan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru yang se-aliran dan se-ideologi atau yang setidaknya mendukung dan mau bekerja sama dengan pemerintah. Setelah penggeseran berhasil, langkah selanjutnya adalah *Penggabungan sasaran* dan *Pengawasan dan pengamanan sasaran*.